

**KONFLIK NASIONALISME DI INDONESIA:
DARI SEPARATISME HINGGA
PEMBANGUNAN NASIONALISME EKONOMI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

**KONFLIK NASIONALISME DI INDONESIA:
DARI SEPARATISME HINGGA
PEMBANGUNAN NASIONALISME EKONOMI**

Penulis:
Zulham Ibrahim
Risna Dewi
Ristati
Nazaruddin

Editor:
Harjoni Desky



**KONFLIK NASIONALISME DI INDONESIA: DARI SEPARATISME
HINGGA PEMBANGUNAN NASIONALISME EKONOMI**

© Penerbit Kepel Press

Penulis:

Zulham Ibrahim

Risna Dewi

Ristati

Nazaruddin

Editor:

Harjoni Desky

Desain Cover :

Winengku Nugroho

Layout :

Safitriyani

Cetakan Pertama, Agustus 2018

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara_books@yahoo.com

ISBN : 978-602-356-209-1

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang. Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku “*Konflik Nasionalisme di Indonesia: dari Separatisme Hingga Pembangunan Nasionalisme Ekonomi*” ini disusun berdasarkan pengamatan tim penulis atas realita yang telah terjadi selama ini di Indonesia. Kehadiran buku ini melengkapai kekosongan terhadap materi Konflik Nasionalisme di Indonesia: dari Separatisme Hingga Pembangunan Nasionalisme Ekonomi.

Semoga buku ini dapat disambut dengan baik oleh para pembaca. Buku ini disusun dalam beberapa bab secara singkat dan padat, membahas topik-topik tersebut. Dan semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa atau masyarakat yang sedang menekuni ilmu politik dengan dinamikanya. Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, karena itu diskusi dan saran pembaca selalu penulis tunggu dalam rangka perbaikan buku ini.

Yogyakarta, Agustus 2018

Penulis

Zulham Ibrahim, dkk

KATA EDITOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Awal membaca draf buku ini, saya menemukan bahwa buku ini berisikan narasi yang baik terkait dengan isu nasionalisme, konflik dan pembangunan. Dan menurut saya pribadi, kajian dalam buku ini sangat tepat, terutama bila dikaitkan dengan kondisi kebangsaan hari ini. Semangat yang dipancarkan dari buku ini, semoga dapat dirasakan dan ditanggap juga oleh para pembaca. Tentu saja buku yang sederhana ini masih ada kekurangan, karena itu masukan dan saran dari kita semua para pembaca sangat bermanfaat bagi kesempurnaan buku ini dimasa-masa yang akan datang, Amin.

Yogyakarta, Agustus 2018

Editor

Harjoni Desky

KATA PENGANTAR PENERBIT

Salam Semangat...

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan Kami saat menerbitkan cetakan pertama buku ini. Cetakan pertama ini merupakan hasil tulisan para peneliti atau dosen dari salah satu universitas ternama di Aceh yaitu: Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Para penulis ini dengan penuh semangat menyampaikan tema seputar “*Konflik Nasionalisme di Indonesia: dari Separatisme Hingga Pembangunan Nasionalisme Ekonomi*”. Tema besar ini dibagi dalam berbagai sub tema disampaikan dalam buku ini, sehingga dapat membawa pembaca untuk lebih dekat dengan Aceh serta memahami sejarah Aceh dengan baik. Kami tentunya menyadari bahwa cetakan pertama ini masih sangat banyak kekurangan, karena itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Upaya perbaikan akan kami lakukan terus menerus untuk memperbaiki kualitas buku ini. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

Penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
KATA EDITOR	vii
KATA PENGANTAR PENERBIT	ix
BAB I PERKEMBANGAN NASIONAL INDONESIA	1
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL NASIONALISME	7
BAB III PEMAKNAAAN DAN KEBERADAAN KONFLIK	11
BAB IV NASIONALISME DAN KEDAULATAN.....	17
I. NASIONALISME	17
II. NASIONALISME DAN KEDAULATAN	20
BAB V CIVIC DAN ETHNO-NASIONALISME	23
BAB VI PERJALANAN NASIONALISME DI INDONESIA	29
BAB VII ETHNO NASIONALISME ACEH	49
BAB VIII PERJALANAN HISTORIS NASIONALISME INDONESIA	63

BAB IX PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA	75
BIODATAPENULIS	87

BAB I

PERKEMBANGAN NASIONAL INDONESIA

Buku ini membahas masalah model perkembangan nasionalisme Indonesia, dari nasionalisme daerah, pembangunan nasionalisme ekonomi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk lebih memahami, ini dimulai dengan pentingnya kerangka konseptual. Konsep bangsa perlu dijabarkan terlebih dahulu sebelum menggambarkan nasionalisme. Kemudian dari negara, selanjutnya kajian dijabarkan dengan asal usul, konsep dan definisi nasionalisme.

Selain kedaulatan, nasionalisme kewarganegaraan dan etno-nasionalisme juga tidak terlepas dari penjelasan yang sangat esensial. Karena etno-nasionalisme telah diperdebatkan sebagian besar negara modern dan terutama multi etnis dan nasionalisme sipil yang ada sekarang, etno-nasionalisme dianggap sebagai ancaman berbahaya laten dan juga tantangan yang tak terduga bagi negara-negara modern, khususnya Indonesia sebagai negara kepulauan Dan mencakup berbagai wilayah etnis.

Setelah menjelaskan semua konsep tersebut, penulis kemudian memulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang nasionalisme Indonesia, kemudian membahas nasionalisme sekuler nasional Indonesia, etno-nasionalisme dan pada kajian di akhir, akan mengupas Aceh dimana sudah bergesernya etno nasionalisme menuju Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kasus Indonesia, etno-nasionalisme memiliki kecenderungan dan juga orientasi untuk kebebasan dari negara yang ada dengan mempertimbangkannya kembali sebagai kedaulatan pra-kolonial, yang penekanannya lebih mengarah kepada bahasa, budaya, agama dan sejarah. Seperti kebijakan nasional sebelumnya dapat mendukung keberadaan etnis-nasionalisme Aceh, semacam kesatuan sebagai bentuk Indonesia yang bersatu daripada federalisme.

Di mana masyarakat Aceh berpendapat bahwa Indonesia tidak lebih daripada penjajah internal baru melalui sistem pemusnahan dan telah memanfaatkan sumber daya lokal yang kaya dari pemerintah pusat yang unitarian. Sebagai tanggapan, masyarakat Aceh mengklaim bahwa mereka bukan bagian dari Indonesia.

Pada periode pasca perang dunia kedua, dalam gerakan pembebasan nasional, sebuah bentuk baru nasionalisme mengguncang fondasi imperialisme dan menghasilkan percepatan proses dekolonisasi. Sebagian besar negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin membuang imperialisme, dan nasionalisme yang didasarkan pada demokrasi, kemauan rakyat, kebebasan dan keadilan dihasilkan karena lebih dari 100 negara bangsa baru ada (Egyankosh, 32).

Dengan kata lain, di Asia Timur, nasionalisme telah berhasil melewati abad ke-20 dan telah menjadi retorika bukan hanya perjuangan anti-imperialistapi juga seruan untuk memberdayakan dan mendemokratisasi negara dari dalam (Calhoun, 1993: 213-14). Kebanyakan sumber utama nasionalisme Asiatik adalah perlawanan individu terhadap perubahan pola kebiasaan. Ketahanan ini diperkuat dengan merasakan bahwa kegigihan

kelompok bergantung pada ketekunannya yaitu budaya, yang harus dilindungi dengan biaya apapun (Spykman, 1926: 407).

Sebaliknya, saat memprotes peraturan Barat, nasionalis Asia sering memberi penghormatan kepada Barat dengan alasan negara mereka mengadopsi institusi politik Barat (Braisted, 1954:360). Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara di Afrika dan Asia untuk menciptakan negara-negara kesatuan dari populasi etnis yang sangat heterogen belum pernah bertemu dengan kesuksesan besar sampai sekarang.

Kita perlu mengingat kembali perpecahan dan konflik di negara-negara baru seperti Indonesia, Nyanmar, Srilanka, Irak, Somalia dan Angola, dan kegagalan relatif mereka untuk menghasilkan sebuah komitmen populer yang mengesampingkan 'negara' kewarganegaraan dan kewarganegaraan berdasarkan pada posisi kolonial Negara dan itu adalah pembatasan diri(Smith, 1996: 448). Kegagalan ini menyebabkan munculnya etno-nasionalis, yang berarti tinggal di wilayah yang ditentukan dan ingin berpisah dari negara, seringkali memiliki sejarah seseorang yang mandiri.

Penduduk Aceh sejauh ini adalah contoh Indonesia yang sesuai. Selain konflik etno-nasionalisme, ada empat kategori konflik, seperti persaingan komunal, yang merujuk secara langsung tersebar melalui wilayah tersebut dalam masyarakat majemuk, dan bersaing dengan kelompok-kelompok lain untuk mendapatkan bagian kekuasaan politik. Misalnya konflik antara Muslim dan Kristen di Ambon atau Poso, konflik kelas etno yang mengacu pada kehidupan yang tersebar melalui wilayah dalam masyarakat majemuk, dan menginginkan partisipasi yang lebih besar di negara untuk mencapai persamaan hak dan kesempatan untuk mengatasi dampak diskriminasi akibat status imigran dan

minoritas mereka.

Contohnya adalah bahasa Tionghoa Indonesia; Penduduk asli ingin tinggal di wilayah yang ditentukan dan menginginkan otonomi lebih besar dari negara yang mengaturnya, terutama terkait untuk melindungi tanah tradisional, sumber daya, dan budaya mereka. Aceh, warga Dayak di Kalimantan dan juga penduduk Papua adalah contoh nyata dari konflik ini; Yang terakhir adalah sekte militan (agama) yang mengacu pada kelompok kecil yang biasanya hanya memperjuangkan ideologi religius (Klinken, 2003: 112-13).

Pada akhir abad kesembilan belas, sebagian besar penduduk dunia hidup di bawah pemerintahan kolonial. Namun, pada pertengahan abad ke-20, kebanyakan koloni telah mencapai atau sedang dalam proses mencapai kemerdekaan (Chandra, 1999: 1). Dalam formasi negara, gagasan negara, ketertarikan adalah ciri khas identitas politik. Minat dapat dimanifestasikan sebagai 'kepentingan pribadi' (diri sendiri dan kelompok keluarga terdekat); 'Kepentingan bersama' (bersamaan dengan kelompok yang lebih luas); 'Kepentingan pribadi yang tercerahkan' (dari diri sendiri dengan membantu mengamankan nasib orang lain); Dan 'altruisme' (terutama untuk keuntungan orang lain). (Kingsbury, 2002: 69).

Berdasarkan minat di atas, di masa lalu, hampir semua negara bangsa memutuskan bahwa ini adalah wilayah nasional dengan paksaan, didukung oleh hak mutlak negara dan elit dengan spekulasi opini dan sentimen populer. Sebagian besar negara memiliki hak hukum yang diberikan oleh konstitusi mereka mengenai kepentingan masing-masing terhadap batas negara.

Negara-negara bangsa mencoba melakukan diplomasi

koersif sementara diplomasi lunak tidak menjanjikan solusi atau sebelum mengumumkan perang dengan negara-negara lain untuk menegaskan bahwa ini adalah batas-batas nasional. Dunia terbagi dalam beberapa negara, di mana kemudian negara-negara ini didorong untuk menekankan wilayah nasional masing-masing serta kedaulatan nasional secara paksa.

Tidak terlepas juga, negara bagian (provinsi) yang juga secara intensif menciptakan penekanan terhadap kepemilikan bagian daerah dalam rangka menumbuhkan kedekatan daerah-daerah tersebut terhadap negara dan pendekatan terhadap tatanan kedaulatan nasional itu sendiri. Namun pendekatan negara ini cenderung mengabaikan dan mengecualikan adanya hak sipil kepada kelompok-kelompok dari kebijakan pengambilan keputusan, yang mengakibatkan hanya merepresentasikan kepentingan elitis dan pribadi, bukan mewakili negara-negara besar (He & Reid, 2004: 297).

Sebagian besar negara yang dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan wilayahnya adalah teritorial yang sangat luas dan multi etnis sehingga menjadi tempat yang terorganisir, saling bergantung secara keseluruhan. Masalah ini juga telah dihadapi secara intensif oleh Indonesia, terutama dalam pengembangannya tiada lain yaitu nasionalisme negara (Drake, 1992: 296).

Sebelum Indonesia merdeka, nasionalisme pun diperdebatkan dan ditekankan “bumiputra” dan “pribumi”. Istilah “bumiputra” dan pribumi “digunakan untuk membedakan penduduk asli dari penduduk kolonial. Istilah ini mulai populer selama tahun 1920 dan 1930an di Malaysia dan juga di Indonesia. Bumiputra dan pribumi keduanya berasal dari kata-kata Sanskerta.

“Bumi” yang memiliki definisi tanah dan “putra” bisa

dipahami sebagai pangeran, atau lebih dipahami sebagai “anak”. Pribumi sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa, yang berarti pribumi. Dengan demikian, konsep ini sebelumnya digunakan untuk membedakan antara penduduk asli dan penduduk yang tidak asli (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 662-3).

Selain keberadaan bumiputra dan pribumi, proses pencapaian persatuan nasional Indonesia adalah beberapa hal yang unik, selama enam dekade pertama, umumnya berlangsung dalam perpaduan multi etnis dan integrasi teritorial. Kebutuhan ekonomi seperti pajak, perbendaharaan, batas adat dan wilayah telah dibentuk oleh penjajah Belanda.

Sebaliknya, Belanda, saat merumuskan penyatuan nasional, menyangkal nilai-nilai etnis tertentu. Memang, rasa permusuhan yang dilakukan oleh Belanda di antara penduduk Indonesia, bukannya memasukkan komponen prinsip multi etnis, budaya nasional dan bahasa nasional (Lane, 2002).

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL NASIONALISME

Sebelum membahas konsep nasionalisme, maka perlu untuk melihat keberadaan bangsa pada awalnya. Gagasan bahwa sekelompok orang mungkin menciptakan ‘negara’, yang berlandaskan pada dasarnya memiliki hak otonomi politik, beberapa kejadian terutama didasarkan pada klaim mereka terhadap leluhur etnis yang sama, latar belakang etno-budaya yang sama, dan beberapa kali terutama di bidang teritorial yang mengklaim bahwa mereka berasal dari berbagi wilayah tertentu dan kebanggaan bersama di dalamnya adalah institusi publik dan cara hidup publik (Brown, 2001: 2).

Asal-usul bangsa berasal dari konsep bangsa Barat yang kembali beberapa abad yang silam, pada abad ke-18 orang-orang kelas menengah di Eropa Barat dan Amerika Utara semakin mengenal dengan perasaan bahwa “bangsa” itu milik mereka. Dua ilustrasi tertua tentang kesadaran nasional modern adalah bahasa Prancis dan bahasa Inggris (Knight, 1982: 518-519).

Liah Greenfeld memperdebatkan gerakan nasional, mulai dari Inggris abad ke-16, dan berlanjut sampai pertengahan abad ke-17 Prancis, Rusia pada paruh kedua abad ke-18, akhir abad 18 dan awal abad 19 di Jerman, adapun Amerika Serikat pada akhir abad 18 sampai pertengahan abad ke-19 (Tamir, 1995: 419). Seton-Watson mengatakan sebuah negara dikatakan ada ketika

anggota masyarakat yang signifikan dalam sebuah komunitas menganggap diri mereka untuk membentuk sebuah negara, atau berperilaku seolah-olah mereka membentuk satu kesatuan (Smith, 2000:492).

Suatu bangsa sering dipahamiterdiri dari komunitas etnis atau budaya (Plato, 2001:1). Menurut Erness Renan bahwa sebuah bangsa adalah “jiwa, prinsip spritual” dan bahwa dia melanjutkan keberadaan sebuah bangsa adalah hasil dari “plebisit harian” (Savich:2). Istilah bangsa dapat dipahami sebagai apa yang dijelaskan oleh Ernest Barker “sebuah negara adalah sekumpulan manusia, yang mendiami wilayah yang pasti, yang biasanya diambil dari ras yang berbeda, namun memiliki persediaan pemikiran dan perasaan yang sama yang diperoleh dan dikirim selama perjalanan sejarah umum ..”(Egyankosh:31).

Selain itu, Smith berpendapat bahwa sebuah negara adalah sebuah organisasi di mana orang biasa dapat memperoleh haknya dan dapat memiliki perasaan kesatuan. Keberadaan bangsa bergantung pada individu dan memanifestasikan dirinya sebagai solidaritas di antara keduanya. Sebuah bangsa bukan hanya penggabungan individu. Hubungan antara individu juga harus dipertimbangkan (Smith, 2009: 2). Dengan kata lain, sebuah negara bergantung pada persetujuan yang disengaja dan dalam banyak hal itu adalah komunitas atau penciptaan politik yang dibayangkan (Savich: 2).

Demikian pula dengan apa yang King katakan, bangsa itu berarti sekelompok orang yang mirip budaya, menyadari kesamaan mereka satu sama lain dan perbedaannya dari orang lain, terlepas dari suatu organisasi politik yang sama dan sepenuhnya independen (King, 1934: 820). Selain itu, sebuah negara sebagai populasi manusia bernama berbagi wilayah

bersejarah, mitos umum dan kenangan sejarah, massa, budaya publik, ekonomi bersama dan hak dan kewajiban umum untuk semua anggota (Smith, 1996: 447). Dalam definisi ini, Smith menggabungkan alasan bersama dari kemunculan sebuah negara (wilayah historis bersama, ekonomi bersama, dan sistem hukum bersama) dengan hasilnya, (berbagi mitos dan kenangan sejarah) (Tamir, 1995: 424).

Dengan demikian, tujuan-tujuan ini, menyebabkan seruan nasionalisme yang khas secara modern sebagai “teori legitimasi politik, yang mewajibkan batas-batas etnis tidak boleh melalui politik, dan khususnya, bahwa batas-batas etnis harus memiliki batas dalam keadaan tertentu yang kontinjensi. Sudah dikecualikan oleh prinsip di dalamnya yaitu perumusan umum tidak boleh memisahkan pemegang kekuasaan dari yang lainnya (Gellner dalam Calhoun, 1993: 213).

Meskipun, keberadaan bangsa berasal dari konsep Eropa dan Barat, bagaimanapun, proses dekolonisasi lebih merupakan hasil dari sikap anti-imperialis daripada sentimen nasionalis, sehingga membuat sejumlah besar negara bagian lahir setelah 1945 tidak dapat diklasifikasikan sebagai “negara-negara” (Hobsbawn dalam Walker, 2003: 2). Anderson berpendapat bahwa sebuah bangsa adalah komunitas yang dibayangkan karena tidak mungkin semua anggota saling berhubungan langsung dengan sesama anggota setiap saat.

Oleh karena itu, anggotanya hanya bisa memandang bangsa secara keseluruhan dengan mengacu pada citra itu yang mereka temukan dalam pikiran mereka sendiri (Tamir, 1995: 421). Dimana negara adalah entitas politik dengan tingkat kedaulatan yang tinggi (Plato, 2001: 2). Singkatnya di seluruh bangsa pada akhirnya merupakan produk nasionalisme yang dibentuk oleh

dan ditargetkan pada negara modern (Breuilly dalam Smith, 1996, hal 448).

Dari paparan para ahli di atas, penulis mendeskripsikan bahwa nasionalisme dari perkembangan awalnya hingga pada zaman monderen sekarang ini adalah lebih menekankan kepada keadilan finansial dan ekonomi yang dibentuk oleh pimpinan terhadap anggota, dimana bila ekonomi hanya dimiliki dan dikuasai oleh golongan, etnis dan elit tertentu dalam suatu Negara atau kesatuan, maka kebersamaan rasa, meimiliki dan cinta territorial tidak akan dapat dibentuk. Ini yang diesbut dengan nasionalisme ekonomi.

BAB III

PEMAKNAAN DAN KEBERADAAN KONFLIK

Kamus mendefinisikan “konflik” sebagai “perjuangan untuk melawan atau mengatasi; persaingan melawan kekuatan atau kekuatan yang berlawanan; perselisihan; pertempuran. Suatu keadaan atau kondisi oposisi; antagonisme; perselisihan. Ketegangan yang menyakitkan yang dibentuk oleh bentrokan antara impuls yang berlawanan dan kontradiktif. ‘Konflik’ memiliki banyak arti dalam kehidupan sehari-hari, bagi beberapa orang mengacu pada perilaku atau tindakan.

Ada konflik ketika serikat pekerja mogok atau majikan menguncikaryawannya. Juga konflik ketika kedua negara saling berperang satu sama lain, dan di mana medan perang terus menentukan hubungan mereka, tindakan tersebut merupakan konflik, sebuah gencatan senjata bukanlah akhir dari sebuah konflik bahkan, persatuan sentimen verbal, tindakan tanpa kekerasan, mobilisasi petisi, boikot dan sanksi dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, ini juga disebut konflik. Mungkin masih ada ketidakpuasan, jelas konflik lebih dari pada sekedar perilaku para pihak yang sedang berseteru (Wallensteen, 2002: 15).

Awalnya ilmuwan konflik Jerman, Georg Simmel, memandang konflik sebagai ciri kehidupan sosial yang ada di mana-mana. Simmel menganalisis konflik sebagai bentuk umum hubungan sosial yang diwujudkan dalam berbagai konteks kelompok atau

masyarakat. Simmel memberikan beberapa wawasan tajam tentang bagaimana konflik dan permusuhan yang tak terelakkan muncul di antara berbagai kelompok dalam masyarakat terorganisir dapat memiliki fungsi positif seperti memperkuat batas-batas kelompok dan menyatukan anggota kelompok bersama-sama dalam tujuan yang sama.

Pekerjaan Simmel tentang konflik kelompok memiliki dampak penting pada sosiolog Amerika selama awal abad ke-20. Konsep konflik menjadi sangat menonjol dalam analisis kejahatan dan kenakalan oleh sosiolog selama tahun 1930an. Misalnya, tingkat kejahatan yang tinggi di antara populasi imigran di daerah perkotaan dianggap disebabkan oleh konflik budaya antara peraturan hukum masyarakat Amerika dan norma perilaku tradisional budaya asli imigran (Orcutt: 1983).

Periset konflik dan perdamaian mengatakan bahwa, konflik adalah ekspresi dari kepentingan yang berlawanan, bahwa hal itu khas bagi masyarakat modern, bahwa mereka mewabah di masyarakat modern. Definisi konflik dapat diperluas dari individu ke kelompok (seperti negara bagian atau negara), dan lebih dari dua pihak dapat terlibat dalam konflik tersebut. Prinsipnya tetap sama (Nicholson, 1992: 1). Himes berpendapat bahwa siswa konflik sosial telah memberikan banyak definisi konflik yang berbeda. Sejak awal, Park dan Burgess mendefinisikannya hanya sebagai perjuangan untuk mendapatkan status.

Tidak lama kemudian, Mack dan Snyder mendefinisikannya sebagai perjuangan tidak hanya untuk status tetapi juga untuk sumber daya langka dan perubahan sosial yang signifikan (dalam Bartos & Wehr, 2002: 12). Konflik, ini adalah kata yang menyebabkan sebagian besar dari kita mengalami ketidaknyamanan, kemarahan, frustrasi, kesedihan, dan rasa

sakit yang hebat. Dengan kata lain, konflik adalah permusuhan yang terdiri dari antagonisme, oposisi atau perlawanan dalam pemikiran atau prinsip.

Pendekatan Marxis, konflik menekankan interpretasi materialis tentang sejarah, metode analisis dialektis, sikap kritis terhadap pengaturan sosial yang ada, dan program politik revolusi atau setidaknya reformasi. Pandangan materialis tentang sejarah berawal dari premis bahwa penentu terpenting kehidupan sosial adalah pekerjaan yang dilakukan orang, terutama pekerjaan yang menghasilkan kebutuhan dasar kehidupan, makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Marx berpikir bahwa cara kerja diatur secara sosial dan teknologi yang digunakan dalam produksi akan memiliki dampak yang kuat pada setiap aspek masyarakat lainnya. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu yang bernilai di masyarakat dihasilkan dari kerja manusia. Dengan demikian, Marx melihat pria dan wanita bekerja sebagai terlibat dalam membuat masyarakat, dalam menciptakan kondisi untuk eksistensi mereka sendiri (McClelland: 2000).

Kaum neo-Marxis telah berusaha untuk memperluas pandangan Marx bahwa sistem hukum dan politik masyarakat kapitalis adalah produk dari proses konflik historis yang mendasar antara kelas ekonomi yang berlawanan. Oleh karena itu, teori neo-Marxis memusatkan perhatian khusus pada struktur ekonomi masyarakat dan pada hubungan definisi sosial tentang penyimpangan terhadap proses konflik kelas. Teori konflik kelompok kepentingan, di sisi lain, cenderung didasarkan pada asumsi pluralistik bahwa semua masyarakat modern mengandung sejumlah kelompok dengan kepentingan dan nilai konflik atau persaingan.

Bekerja dengan konsepsi yang lebih beragam tentang proses politik daripada kaum neo-Marxis, para teoritikus kelompok kepentingan berpendapat bahwa perubahan dalam undang-undang atau dalam sistem kontrol sosial dapat dihasilkan oleh konflik antara berbagai kelompok budaya, agama, atau etnis dan juga oleh konflik. Antara kelompok dengan kepentingan ekonomi yang berbeda (Orcutt: 1983). Kontribusi Max Weber terhadap teori konflik, Weber memulai dengan rumusan Marx tentang pertanyaan tersebut dan menerima bahwa kelas itu berasal dari ekonomi. Bagi Weber, stratifikasi lebih dari sekedar posisi kelas yang ditentukan secara ekonomi, namun juga melibatkan pertimbangan status, kekuasaan dan partai politik (Sociology Organization, 1994).

Pada tahun 1960, Johan Galtung, yang pertama kali mengajukan konflik kepada Peace Research Institute di Oslo pada bulan Januari 1968, ini memecahkan konflik ke dalam situasi, perilaku dan sikap, dengan masing-masing sangat mempengaruhi yang lain. Mitchell mendefinisikan konflik adalah situasi konflik dianggap sebagai situasi di mana dua atau lebih entitas sosial atau partai (bagaimanapun didefinisikan atau terstruktur).

Memahami bahwa tujuan tersebut memiliki tujuan yang sama sekali tidak sesuai. Louis Kriesberg mengatakan sebuah konflik terjadi ketika dua atau lebih orang atau kelompok menunjukkan keyakinan bahwa mereka memiliki tujuan yang tidak sesuai. Definisi di atas dapat diterapkan untuk mencegah hubungan anak, olahraga kompetitif, kontak antara kelompok etnis atau keterputusan dalam urusan diplomatik antara dua negara (Jacoby, 2008: 8-19).

Selanjutnya, teori konflik berasumsi bahwa konflik dapat berasal baik dalam ketidakcocokan tujuan atau dalam

permusuhan (atau keduanya), dan ini melibatkan jenis perilaku yang unik, perilaku konflik. Jadi, konflik didefinisikan di sini sebagai situasi di mana aktor menggunakan perilaku konflik satu sama lain untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dan / atau mengekspresikan permusuhan mereka (Bartos & Wehr, 2002: 3).

Ketidakcocokan berarti bahwa individu atau kelompok, yang biasa disebut 'aktor' atau 'partai', berpikir bahwa realisasi satu atau lebih tujuan mereka sedang, atau akan, digagalkan oleh pihak lain. Ini mungkin positif karena mereka mengacu pada hasil yang diinginkan atau negatif jika dikaitkan dengan penghindaran masa depan yang tidak diinginkan (Jacoby, 2008: 19).

Sampai saat ini, penelitian tentang sumber dan sifat konflik biasanya berpusat di sekitar dua untaian ontologis: pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Pendekatan subjektif terhadap konflik berfokus terutama pada tujuan inkompatibilitas yang dirasakan. Implikasi penting dari hal ini adalah, pertama, banyak tujuan secara subjektif dianggap tidak sesuai, di mana dari sudut pandang objektif mereka dapat benar-benar kompatibel.

Hal ini mungkin karena salah informasi, kesalahpahaman budaya, atau kesalahan persepsi seperti stereotip, ketidakpercayaan dan tekanan emosional. Kedua, hubungan yang tidak adil dan tidak adil secara struktural tidak sering dikenali, setidaknya salah satu pihak yang terlibat gagal memahami ketergantungan mereka sendiri dan perlakuan yang tidak setara oleh orang lain. Hal ini dapat dicontohkan oleh fenomena, budak bahagia. Ini persis dengan situasi terakhir dimana pendekatan objektif diperhatikan. Ini mencari asal mula konflik dalam susunan sosial dan politik dan struktur masyarakat. Di sini, titik krusialnya adalah bahwa konflik dapat ada secara independen

dari persepsi pihak-pihak yang terlibat (Reimann: 3).

Definisi di atas semua yang dapat dikatakan, konflik terdiri dari tiga komponen: tindakan, ketidakcocokan dan aktor. Menggabungkannya, kita sampai pada sebuah definisi lengkap tentang situasi sosial konflik dimana setidaknya dua aktor (pihak) berusaha untuk memperoleh pada saat yang sama pada saat tersedianya serangkaian sumber daya yang langka (Wallensteen, 2002: 16).

Karena itu, realitas konflik berkepanjangan dan etno-nasional saat ini, nampak jelas bahwa sebagian besar ini paling sesuai dijelaskan sebagai proses dinamis yang melibatkan fitur subjektif campuran (seperti identitas, kebutuhan dan kepentingan) dan yang diduga bersifat objektif dan struktural (seperti distribusi sumber daya yang tidak setara (Reimann: 4).

Ada juga hubungan antara konflik dan pembangunan. Hubungan antara teori konflik dan konflik saat ini menekankan penyediaan bantuan dalam kasus-kasus konflik kekerasan. Intervensi pembangunan perdamaian setelah konflik kekerasan menangani masalah yang sama dengan intervensi pembangunan. Jelas, pembangunan merupakan inti dari intervensi pasca-konflik, di mana lanskap fisik dan sosial telah rusak. Dalam kasus tersebut, bantuan pembangunan disediakan (Barbanti: 2004).

Dari uraian konflik menurut para ahli di atas, penulis berargumentasi bahwa konflik adalah pertikaian antara lebih dari satu individu, kelompok, organisasi, kelas, suku dan Negara yang disebabkan tidak terpenuhinya atau ingin berlebihnya kebutuhan dasar material dan immaterial dari orang lain, sehingga mengabaikan kepatuhan hukum, pembangunan, ekonomi, social, agama, budaya dan nasionalisme.

BAB IV

NASIONALISME DAN KEDAULATAN

I. Nasionalisme

Peter Alter mengatakan bahwa nasionalisme adalah “salah satu pemikiran yang paling ambigu di masa depan, terutama dalam konsep politik dan analisis leksikon. Setelah mendefinisikan dua jenis utama nasionalisme: nasionalisme Risorgimento yang berarti kebangkitan orang Italia yang berlaku bagi negara-negara yang berusaha membangun sebuah negara.

Seperti Yunani, Italia, Jerman, Polandia, Serbia dimana menerapkan nasionalisme ini di abad ke-19. Kedua, nasionalisme integral, juga dikenal sebagai “radikal”, “ekstrem”, sayap kanan, reaksioner, agresif-ekspansionis, derivatif, nasionalisme militan. Nasionalisme integral mulai ada setelah sebuah negara telah mencapai kemerdekaan dan telah membentuk sebuah negara, seperti Nazi Jerman dan Fasis Italia (Savich: 5).

Istilah ‘nation’, nationality ‘dan’ nationalism ‘memiliki arti dan definisi yang sangat besar. Sebagaimana Carlton J.H. Hayes mengatakan “kebanyakan nasionalisme adalah nasionalisme merupakan sebagai tempat yang umum dalam mode pemikiran dan tindakan penduduk beradab dari dunia kontemporer bahwa manusia menganggap nasionalisme begitu saja”. Orang membayangkan bahwa itu adalah “hal yang paling alami di alam

semesta” (dalam Egyankosh: 30).

Nasionalisme sebagai ideologi politik modern hanya ada setelah mengikuti revolusi Prancis tahun 1789 dan berkembang pada abad ke-19. Nasionalisme yang diraih puncaknya adalah pada saat Perang Dunia I. Nasionalisme bergantung pada fantasi kelompok atau “komunitas imajiner” dan produk industrialisasi, kapitalisme, dan modernisasi. Industrialisasi dan nasionalisme berkembang dan terus berkembang dalam hubungan simbiosis, yang mana masing-masing saling memperkuat (Savich: 1-2).

Nasionalisme mengambil lintasan sejarah tertentu di Barat, namun di belahan dunia lain, nasionalisme berkembang menjadi reaksi langsung dan, bersamaan dengan Barat. Perbedaan antara perkembangan nasionalisme di Barat dan bagian dunia lainnya dapat dikategorikan dalam dua pengertian. Pertama, munculnya nasionalisme barat yang dipompa oleh adanya pencerahan (*enlightenment*), yang sangat menekankan gagasan, persamaan dan rasionalitas, dan dari tahap awal, karakternya lebih lunak daripada Timur. Kedua, sifat kompetitif sistem juga dimaksudkan sebagai Timur yang berkembang dalam reaksi langsung yang juga mengancam pencapaian Barat (Lawfield, 2009: 2).

AD Smith menawarkan definisi nasionalisme yang lebih merangkul sebagai gerakan ideologis, untuk pencapaian dan pemeliharaan pemerintahan sendiri atas nama sebuah kelompok, beberapa di antara anggotanya menganggapnya sebagai sebuah ‘bangsa’ aktual atau potensial seperti yang lain (dalam Smith, 2000: 492). Shafer dan Kedouri sangat setuju bahwa nasionalisme melibatkan mitos yang berhubungan dengan mendorong perasaan kesetiaan terhadap kelompok dan identifikasi dengan kesadaran kelompok tentang dirinya sendiri dan menyebabkan

kelompok tersebut memiliki atau menginginkan kemerdekaan politik di bawahnya atau pemerintahan sendiri dan merupakan wilayahnya sendiri. Mereka pasti juga setuju bahwa nasionalisme secara keseluruhan adalah kompleks gagasan, sikap, peristiwa, dan gerakan politik. Nasionalisme tentu sebuah ide, tapi juga merupakan kekuatan (Knight, 1982: 521).

Tidak kalah menariknya juga ide dari Gellner dan Hobbsbawn yang mengatakan nasionalisme sebagai prinsip politik yang bertujuan untuk menyatukan kesatuan politik dan nasional yang terdiri dari lembaga birokrasi dan hukum, bahasa bersama dan kesetiaan warga terhadap unit ini (Hjerm: 2). Nasionalisme juga mengacu pada gerakan sosial, sikap, dan ideologi yang menjadi ciri perilaku kebangsaan yang terlibat dalam perjuangan untuk mencapai, mempertahankan, atau meningkatkan posisi mereka di dunia (Wirth, 1936: 273). Akhirnya, nasionalisme dapat didefinisikan sebagai sikap suatu populasi yang menghasilkan anggota yang memberikan kesetiaan tertinggi mereka kepada suatu bangsa (King, 1934: 820).

Akhirnya ada nasionalisme yang baik dan buruk atau positif dan negatif. Hearn menyajikan pandangan positif bahwa nasionalisme adalah pembuatan klaim gabungan atas nama suatu populasi untuk diidentifikasi, yurisdiksi dan wilayah (dalam Lawfield, 2009: 2). Dengan kata lain, nasionalisme digunakan oleh pemegang kekuasaan politik untuk memaksakan legitimasi mereka dan menyadari kepentingan politik dan ekonominya serta muncul di kalangan minoritas dalam perjuangan mereka untuk kedaulatan (Elias dalam Hjerm: 1).

Dapat juga dimaknai nasionalisme positif mencoba untuk memberi makna pada komunalitas kepentingan kelompok tertentu dan menentukan hak keanggotaan dalam

kelompok semua orang yang dianggap mengarah kepadanya dengan memecah loyalitas ke subkelompok partikularis dan menggantinya dengan kesetiaan kepada bangsa sebagai sebuah keseluruhan (Knight, 1982: 521).

Sebaliknya, satu alasan penting adalah bahwa interpretasi awal nasionalisme memiliki nada negatif, nasionalisme berkonotasi kecenderungan untuk menempatkan penekanan berlebihan, berlebihan dan eksklusif yang berlebihan pada nilai negara dengan mengorbankan nilai-nilai lain, yang menyebabkan kegagalan dan Terlalu tinggi perkiraan negara sendiri dan dengan demikian menyebabkan pencabutan orang lain (Boehmdalam Lawfield, 2009: 2), atau nasionalisme negatif mendefinisikan keterpisahan dan eksklusivitas kelompok dan antagonisme tekanan kepada orang lain (Knight, 1982: 521).

Nasionalisme pada saat bersamaan adalah kekuatan yang mengintegrasikan dan memisahkan yang mungkin menyebabkan perpisahan kekerasan dari konflik (Elias dalam Hjern: 1). Hal serupa dengan Palmer dan Perkins “dalam bentuk yang paling ekstrim yang telah diperintahkannya untuk benar-benar setara dengan pria dan beberapa tindakan paling tidak manusiawi di usia ini telah dikemas dalam perwujudan mistis dan religius nasionalisme”. Dengan demikian, nasionalisme dapat digunakan sebagai alat untuk tujuan mulia untuk menyatukan orang-orang yang biasanya untuk tujuan yang baik atau mungkin disalahgunakan, karena beberapa diktator bahkan pernah melakukan tindakan yang paling tidak manusiawi seperti genosida (Egyankosh: 31).

II. Nasionalisme dan Kedaulatan

Thomas Hobbes (1588-1679) menjelaskan kedaulatan

sebagai monopoli kekuatan pemaksaan dan menganjurkan agar hal itu dilakukan di tangan peraturan tunggal yang tidak dapat dilawan (Heywood, 2000: 38). Kedaulatan, di dalamnya adalah pengertian yang paling sederhana, adalah prinsip kekuatan absolut dan tak terbatas. Setelah kemunculan negara modern, istilah kedaulatan telah diperbesar dan diklasifikasikan.

Ada banyak jenis kedaulatan, semacam kedaulatan hukum yang menunjukkan otoritas hukum tertinggi yang berarti hak yang tidak dapat dipungkiri untuk menuntut kepatuhan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang; Kedaulatan politik menunjukkan kekuatan politik yang tidak terbatas, yaitu dengan menggunakan kekuatan koersif monopoli untuk menegakkan ketaatan; Kedaulatan internal berarti bahwa kekuasaan atau wewenang tertinggi di negara yang berada di badan hukum yang membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat semua warga negara, kelompok, subkelompok dan institusi di dalam batas wilayah negara; Dan kedaulatan eksternal berkaitan dengan posisi negara di masyarakat internasional dan kapasitas untuk bertindak sebagai entitas independen dan otonom (Heywood, 2007: 131)

Revolusi Amerika dan Prancis memberi kepercayaan pada gagasan kedaulatan nasional mengenai wilayah yang dihuni dimana yurisdiksi diklaim atas nama politik: dalam arti tertentu, kedaulatan rakyat diciptakan. Di Amerika Serikat dan Prancis rezim lama digulingkan oleh tindakan revolusioner, dan kekuatan tersebut masuk ke tangan rakyat sebagai sebuah negara, atau paling tidak, bagi mereka yang mengaku berbicara untuk negara tersebut (Knight, 1982: 519).

Kewarganegaraan dapat dipahami untuk masyarakat karena kepercayaan akan kesamaan dan misi mereka di dunia,

berdasarkan warisan budaya dan karir historis mereka yang bercita-cita tinggi terhadap kedaulatan atas suatu wilayah atau berusaha untuk mempertahankan atau memperbesar pengaruh politik dan budaya mereka dalam menghadapi oposisi (Wirth, 1936: 273).

Dengan demikian, di antara faktor-faktor yang berperan menjiwai dalam gerakan nasionalisme adalah kedekatan wilayah, kesamaan bahasa dan kekerabatan budaya. Gerakan-gerakan ini yang telah diberikan oleh kenangan akan serikat-serikat dinasti sebelumnya dari negara-negara yang terpisah, yang kurang lebih merupakan sejarah umum, bahasa dan budaya, akhirnya didefinisikan dalam konteks politik dengan negara yang terintegrasi dan kedaulatan nasional sebagai tujuan mereka (Wirth, 1936: 725).

BAB V

CIVIC DAN ETHNO- NASIONALISME

Pada zaman kuno dan abad pertengahan, di Eropa, tempat lainya dan masih berlaku di banyak wilayah di dunia ketiga, loyalitas kelompok besar utama masyarakat adalah berdasarkan klan atau suku. Masyarakat atau penduduk didefinisikan oleh kelompok sosial yaitu dimana tempat mereka dilahirkan, dan wilayah mereka bisa (dan di tempat masih dapat) dipahami hanya dalam kaitannya dengan “hubungan sosial dan penjajaran kelompok sosial (Bohannon dalam Knight, 1982: 516).

Secara global telah terjadi kebangkitan nasionalisme etnik sejak tahun 1960an, seringkali dalam bentuk gerakan etnis minoritas melawan negara-negara yang ada (Brown, 2004: 4). Di negara modern misalnya, pecahnya negara multi etnis di Balkan seperti Yugoslavia dan kemunduran Uni Soviet pada tahun 1991 menyebabkan kembalinya eksistensi dan bangkitnya nasionalisme (Savich: 1).

Banyak ilmuwan politik mengamati keadaan ini menurun seiring kembalinya nasionalisme serta kelahiran kembali nasionalisme. Hal ini sangat terkait dengan etno-nasionalisme. Kemunduran ini memberi efek pada negara-negara dunia ketiga lainnya, terutama Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia juga. Di mana kedua negara ini mempertanyakan kembali, ini adalah eksistensi etnis minoritas daripada dominan etnis

mayoritas.

Persamaan anggota kelompok minoritas sering dirugikan dalam kaitannya dengan budaya etnis yang dominan karena mereka harus bergantung pada kelompok mereka yang memiliki bahasa dan budaya yang sama untuk menjalankan urusan sehari-hari. Karena kebebasan untuk melakukan kehidupan sehari-hari seseorang pada dasarnya baik dan sulit untuk mengganti atau melepaskan ketergantungan pada budaya minoritas seseorang /etnis untuk mencapai kebaikan itu, ketergantungan ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan tertentu dan jika tindakan khusus tidak dilakukan serta seimbang (Plato, 2001: 19).

Dalam beberapa dekade terakhir terjadi ketegangan besar antara nasionalisme kewarganegaraan dan etno-nasionalisme yang mengakibatkan adanya multikulturalisme, yang menekankan bahwa bangsa ini diliputi oleh masyarakat multi-etnis dan juga negara menjamin status setara mereka (Brown, 2001: 2). Politik etnis dan nasionalisme bisa berarti dampak politik terhadap etnisitas dan identitas nasional.

Hal ini pada gilirannya dapat menandakan penggunaan etnis dan nasionalisme dalam perebutan kekuasaan para pemimpin dan partai serta kelompok, yang mengarah ke analisis mikro politik etnik atau proses dimana negara menciptakan kelompok dan negara etnis dan konflik mereka, sehingga menghasilkan analisis makro Formasi nasional (Smith, 1996: 445-46).

Etnis-nasionalisme mengacu pada nasionalisme yang didasarkan pada keunikan manusia, dan oleh karena itu, menyiratkan bentuk kewarganegaraan eksklusif berdasarkan anggota yang memiliki identitas etnis yang sama (Bertrand, 2002: 3-4). Etno-nasionalisme dapat juga disebut sebagai nasionalisme budaya yang menekankan bangsa sebagai masyarakat (etno)

kesamaan budaya (Brown, 2001: 2).

Nasionalisme sipil tumbuh dari prinsip revolusi Prancis dan Amerika, yang menekankan bentuk kewarganegaraan inklusif berdasarkan kedaulatan rakyat sebagai individu bebas. Bentuk nasionalisme ini memiliki prinsip dasar yang sama seperti demokrasi karena menekankan kesetaraan dan kebebasan individu (Bertrand, 2002:3).

Selain itu, Kellas mengatakan nasionalisme kewarganegaraan dibagi menjadi sub-bagian, nasionalisme sosial dan nasionalisme resmi. Sementara nasionalisme sosial adalah sebuah negara yang mendefinisikan dirinya dengan ikatan sosial dan budaya daripada oleh kesamaan di mana nasionalisme resmi adalah nasionalisme negara, yang mencakup semua yang secara hukum berhak menjadi warga negara, terlepas dari etnisitas, identitas dan budaya nasional mereka (dalam Lawfield: 4).

Dengan kata lain, nasionalisme warga negara menekankan bangsa sebagai masyarakat warga negara yang setara (Brown, 2001: 2). Dengan demikian, konsepsi kewarganegaraan ini, dan bukannya keanggotaan melalui keturunan, memungkinkan nasionalisme yang lebih inklusif antara masyarakat dengan warga negara yang setara dan memiliki hak, keterikatan patriotik yang bersatu dengan seperangkat praktik dan nilai politik bersama (Ignatieff dalam Lawfield, 2009: 4).

Ras dan etnis menjadi dominan hanya dengan munculnya nasionalisme modern. Misalnya, Kekaisaran Ottoman adalah kerajaan multi-rasial multi-etnis yang hanya memiliki perbedaan agama, Muslim, Kristen, atau Yahudi. Keberadaan nasionalisme mengubah ini (Savich: 11). Nasionalisme etnik lebih mengacu pada masa lalu, ke alam leluhur dan (melalui sejarah bersama). Dalam komunitas seperti itu, karena menuntut keturunan

bersama, dan kewarganegaraan tertutup hanya diakuisisi oleh darah dan 'ritus' kelahiran sesuai dengan hukum 'ius sanguinis' (Lawfield, 2009: 5).

Menurut primordialis dan perennialist, etnisitas cenderung berasumsi bahwa etnik primordial, memberi kondisi manusiawi, dan bahwa negara-negara itu historis namun purbakala. Negara, partai, birokrasi dan politik sebagian besar dianggap sebagai ekspresi publik dari perbedaan etnis dan identitas budaya yang sudah ada sebelumnya (Smith, 1996: 446).

Dalam teori konflik etnis, kriteria etnis adalah sumber pertengkaran yang menonjol di antara masyarakat. Hubungan historis dan linguistik yang khas dianggap sebagai titik referensi utama bagi individu. Ketika pola hubungan sosial antara etika kedua kelompok sedemikian rupa sehingga ketegangan sosial dan hasil konflik, maka tuntutan untuk memperluas pengaruh kelompok etnis dihasilkan (Hah & Martin, 1975: 374).

Konflik Israel-Palestina dengan jelas menunjukkan bahwa wilayah bersama dan kenangan sejarah yang umum dapat menjadi pemecah belah dan bukan pemersatu. Tinggal bersama di wilayah yang sama dan di bawah pemerintahan yang sama, atau bahkan berbagi sistem ekonomi dan hukum, mungkin gagal memadukan beragam komunitas menjadi satu negara, sebagaimana dibuktikan oleh realitas politik di Kanada, Belgia, bekas Yugoslavia, dan Ceko-slowakia (Tamir, 1995: 424-25).

Dalam konteks nasionalisme, premis dasar teori konflik adalah persaingan antar kelompok menimbulkan tuntutan untuk mengendalikan sistem distributif (Hah & Martin, 1975: 69). Nasionalisme masih merupakan dorongan politik yang kuat. Kasus negara-negara bekas konflik etnis seperti Yugoslavia adalah contoh nasionalisme baru-baru ini yang menyebabkan

konflik kekerasan tentang kedaulatan (Hjerm: 1).

Selain trauma tertentu dari keruntuhan negara dalam kasus Soviet dan Yugoslavia mungkin telah berkontribusi pada peningkatan baru-baru ini dalam insiden kekerasan etnis dan nasionalis dalam semua kekerasan politik, yaitu apa yang mungkin disebut etnisasi kekerasan politik (Brubaker & Laitin, 1998: 424). Demikian pula kasus di Indonesia, provinsi Aceh, di mana budaya dan etnis khas Aceh, dan juga bahasa, telah menekankan kembali bahwa ini adalah wilayah pra-kolonial sebelum dimasukkan secara sepihak ke dalam kedaulatan Indonesia dan pada saat bersamaan melawan nasionalisme nasional Indonesia.

Dengan demikian, gerakan etno-nasionalis merupakan tantangan berat bagi demokrasi. Kelompok-kelompok yang dimobilisasi di sepanjang garis etnik mengikuti sebuah negara dan merupakan institusi politik. Mereka berharap untuk mengenali batas-batas dan membuat sebuah negara baru di mana mereka mewakilimayoritas (Bertrand, 2002: 2).

BAB VI

PERJALANAN NASIONALISME DI INDONESIA

Pada akhir abad ke-19, penjajah Belanda memberlakukan apa yang disebut sebagai “kebijakan etis” yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan posisi penduduk asli dalam sebuah pemerintahan kolonial. Gerakan nasionalis Indonesia muncul setelah bangkitnya gerakan nasionalis etnis Tionghoa daratan. Setelah perkembangan nasionalisme Indonesia pada tahun 1920, masyarakat adat mulai meluas penggunaan istilah “Indonesia”.

Umumnya orang Indonesia Tionghoa tidak diperlakukan sebagai Indonesier (Bangsa Indonesia), karena istilah ‘Bangsa Indonesia’ memiliki indikasi untuk ubah istilah “bumiputra”. Meskipun menggunakan dua kata ini (Indonesier dan bumiputra) untuk membedakan status pribumi dengan orang Belanda dan orang Indonesia Tionghoa selama masa pra-independen. (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 668). Rakyat provinsi memutuskan untuk bersatu pada tahun 1920 untuk membangun sebuah negara dan negara baru sebagai respon terhadap kolonialisme (Lane: 2002).

Melalui kebijakan etis ini, kolonial Hindia Belanda telah berusaha untuk membagi orang-orang ke dalam kelompok aristokrat kelas bawah, menengah dan atas. Misalnya, Hindia Belanda mendesak masyarakat pedesaan untuk tetap menjadi

petani, sebaliknya, anggota kelas menengah dan atas ditempatkan di posisi tinggi pegawai negeri.

Sebagian besar pegawai negeri telah didominasi oleh mayoritas etnis Jawa, yang kemudian disebut kelas priyayi (Administrator). Anggota keluarga bangsawan Jawa diberi fasilitas terbaik dan mendapatkan lebih banyak hak istimewa dari Belanda bila dibandingkan dengan warga biasa. Selain etnis Jawa, seperti etnis Aceh, Minangkabau dan Bugis diperlakukan sebagai warga negara yang lebih primitif dan imigran.

Proses kekhasan etnik terjadi di kalangan warga non-pribumi, warga Indonesia-Tionghwa misalnya, di mana kolonial Belanda memberikan fasilitas kepadaminoritas Tionghoa sebuah pengakuan atas keberadaan etnisnya dalam masyarakat. Untuk ini, masyarakat Cina dialokasikan di wilayah khusus oleh kolonial Belanda (Siddique & Suryadinata, 1982: 666).

Kebijakan etnis ini juga berorientasi pada westernisasi elit keluarga aristokrat Jawa, terutama untuk menghindarinya dari pengaruh munculnya gerakan identitas Islam, yang dapat mendorong mereka untuk mengalahkan imperium kolonial Belanda, oleh karena itu, Belanda memberi kesempatan kepada aristokrat ini. Seperti keluarga untuk mendapatkan pendidikan gaya barat di universitas pendidikan yang disponsori Belanda.

Dengan harapan, sebagai balasannya mereka dapat melakukan westernisasi, menasionalisasikan dan mensekulerkan orang-orang Indonesia lainnya (Arifianto, 2008: 9). Sukarno juga salah seorang dari produk lulusan pendidikan barat ini, tentunya sejak ia berasal dari keluarga aristokrat. Sukarno mulai dikenal pada 1920-an. Khususnya pada tahun 1928 di mana dia mendirikan sebuah partai yang disebut Partai Nasional Indonesia (PNI), partai politik ini berpartisipasi pada organisasi massa dan

tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial dan mendukung tujuan akhir kemerdekaan (Ballard, 2008: 16).

Tujuan kebijakan etis lainnya adalah proses migrasi. Gagasan tentang migrasi etnis Jawa berasal dari ide kolonial Belanda, kerajaan kolonial memaksa migrasi Jawa secara massal dan massif ke luar Pulau Jawa, gerakan ini dimulai sejak tahun 1905. Selama masa pasca kemerdekaan, pemimpin Indonesia telah dipengaruhi untuk menerapkan strategi migrasi ini untuk menstabilkan ketidakseimbangan penduduk, karena Jawa sudah banyak penduduknya.

Pada awalnya proses migrasi ini menunjukkan dampak positif bagi pencapaian ekonomi lokal dan regional, yang menjanjikan pendapatan mumpuni bagi kesejahteraan para migran. Selain itu, pemerintah pusat memanfaatkan migrasi ini untuk mengamankan masalah perbatasan dan keamanan negara (Drake, 1992:307). Pada saat bersamaan, kebijakan ini memberikan dampak negatif, yang mana program migrasi ini menghidupkan kembali kekhasan etnis serta kesenjangan ekonomi.

Di mana para migran Jawa telah menduduki hampir semua sumber ekonomi lokal. Sebaliknya, kebijakan pemerintah pusat memiliki kecenderungan untuk melindungi kepentingan para migran daripada mempertimbangkan klaim etnis setempat. Pendudukan ekonomi ini hanya bisa dilakukan dengan kolusi migran asal Jawa dan didukung oleh militer Indonesia pada saat itu.

Jenis nasionalisme Indonesia ditetapkan berdasarkan modifikasi nasionalisme kewarganegaraan. Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada akhir Perang Dunia Kedua dan menjadikannya sebagai pondasi nasional sebagai pilar

penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa dan cita-cita negara bangsa. Pemimpin dan pendiri elit politik berpendapat bahwa wilayah yang melingkupi dengan bekas Hindia Belanda tidak memadai untuk meyakinkan integrasi nasional.

Merasakan kurangnya kepercayaan persatuan nasional ini, para *founding fathers* mendasarkan negara baru pada nilai dan prinsip bersama yang ditujukan untuk pembentukan fondasi nasionalisme negara-negara yang baru. Di mana nilai-nilai umum ini selanjutnya diindoktrinasi sebagai konsep dasar penduduk Indonesia baru (Bertrand, 2002: 7-8).

Pada saat berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda, Bumiputra/pribumi Indonesia masih memperdebatkan jenis nasionalisme apa yang harus diadopsi Indonesia. Setelah wacana yang panjang dan rumit, elit politik Indonesia sampai pada total visi negara, di mana penduduk harus menerima wilayah yang diputuskan oleh Indonesia. Klaim perbatasan nasionalis sangat didasarkan pada kedaulatan *unshared* dan sentralisasi kekuasaan.

Negara baru yang tampaknya mewarisi perjalanan sejarah kerajaannya yaitu kekaisaran kuno dari sistem pemerintahan Sriwijaya dan Majapahit dimana bentuk kerajaannya digunakan atau diadopsi oleh pemerintah baru saat itu. (Kreuzer, 2004:18).

Muhammad Yamin adalah salah satu ide nasionalis yang paling penting, kuat dan besar perannya di Indonesia, setelah Soekarno dan Hatta. Yamin menegaskan bahwa negara baru tersebut harus terdiri dari tanah air Indonesia, yang mana, katanya, paling baru dianggap oleh negara Majapahit. Dan dengan demikian negara yang dia tegaskan, termasuk Sumatra, Jawa, Madura, the Lesser Sundas, Borneo, Celebes, the Moluccas, Semenanjung Malaya, Timor dan Papua. Selanjutnya gagasan ini didukung oleh Hatta (mantan wakil presiden Sukarno) dengan

mengklaim bahwa negara Indonesia yang wilayahnya sesuai dengan wilayah bekas kolonial Hindia Belanda (McIntyre, 1973: 81-82).

Kawasan atau wilayah telah menjadi sub negara paling penting di jaringan politik Indonesia. Banyak provinsi memiliki perspektif sosial dan politik yang berbeda. Hampir di semua provinsi terdiri lebih dari satu identitas etnik. Meski begitu, ada yang agak homogen, misalnya, Jawa Tengah, di mana kebudayaan Jawa paling maju, dan Sumatera barat, yang berasal dari masyarakat Minangkabau dan Sumatera Utara, yang mencakup Kesultanan Melayu tua termasuk masyarakat Batak dan Aceh yang berada di Sumatra.

Terdiri dari sejumlah masyarakat yang berbeda dan memiliki penguasa Kesultanan sendiri sebelumnya (Bowen, 2005: 155). Indonesia terdiri dari bentangan besar timur-barat, yang tersebar di 13.000 pulau. Fenomena geografis ini menghadirkan ancaman laten bagi Indonesia (Drake, 1992: 296).

Karena fragmentasi terbesar wilayah yang dimiliki Indonesia, maka konsep 'Greater Indonesia' digunakan oleh Sukarno sebagai nasionalisme Indonesia yang bertujuan untuk merumuskan kesatuan Indonesia (McIntyre, 1973: 78). Fragmentasi di atas lebih dari separuh penduduknya berasal dari etnis Jawa. Selain itu, Indonesia memiliki tiga ratus suku dan kelompok etnis yang bervariasi hampir di setiap latar belakang budaya.

Selain mayoritas Muslim 89 persen, ada jutaan umat Hindu, Kristen dan Budha (Drake, 1992: 295-6). Selain itu, pada abad ke 18 dan 19, Jawa secara sistematis sangat berkembang, terutama di bawah "Sistem Budaya" yang diimplementasikan dari tahun 1830 dan seterusnya (Guan, 2006: 18).

Dilema utama yang dihadapi negara baru ini adalah bagaimana menyatukan gagasan-gagasan yang berbeda dari sebuah negara besar dan padat penduduk dari begitu banyak sub kelompok etnik yang sedikit banyak dan berbeda dalam budaya, linguistik, dan agama (Ballard, 2008: 17). Meskipun, pada tahun 1928, Pemuda dari seluruh pulau berjanji untuk membangun satu negara, satu bahasa, dan satu negara - sebuah janji yang menjadi prinsip dasar bangsa dan negara.

Benar, pertempuran melawan penjajahan Belanda dalam bentuk Hindia Belanda adalah satu-satunya faktor pemersatu nyata yang menyebabkan pembentukan negara Indonesia (Wanandi, 2002: 136). Tapi, pada berbagai titik di antaranya adalah sejarah, nasionalisme ini mengambil pendekatan konfrontatif dan agak negatif, terutama ketika mereka (masyarakat daerah) merasa dianiaya (Lanti, 2002: 2).

Sukarno memiliki bakat untuk menyatukan tradisi Jawa, Islam, dan versinya sendiri tentang Marxisme untuk mendapatkan banyak pengikut; Namun dia menganjurkan pembentukan sebuah negara sekuler dan bukan negara Islam (Ballard, 2008: 16). Masalah nasionalisme segera muncul setelah kemerdekaan, sementara pertanyaan diajukan untuk menetapkan negara bangsa ini berdasarkan Islam atau menginstalnya sebagai negara sekuler sipil.

Sementara kolonial Belanda menganggap Islam sebagai isu politik yang terus berlanjut dan mensiasatinya dengan menggunakan kekuatan militer, namun keputusan ini tidak menyelesaikan masalah, malah menjadi ancaman militer bagi Belanda sendiri. Sebaliknya, invasi Jepang telah mempertimbangkan Muslim sebagai sekutu, ini membuktikan banyak fasilitas yang diberikan kepada mereka dengan

membentuk 'Dewan Konsultatif Muslim Indonesia' (Majlis Syuro Muslim Indonesia, MASYUMI), yang bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi Islam utama di Indonesia (Guan, 2006: 14-15).

Salah satu faktor terpenting dan juga kekuatan dominan dalam gerakan nasionalisme paling awal adalah faktor agama. Di Jawa (Indonesia) reaksi yang berkembang menemukan bahwa ini adalah ungkapan populer pertama di Sarikat Islam (Masyarakat Islam). Masyarakat ini, yang berangsur-angsur berkembang menjadi satu juta anggota dalam setahun setelah berdirinya, memiliki tujuan ekonomi, sosial, dan politik, namun yang sangat menonjol dari kekuatan utama saat itu adalah kekuatan agama atau cenderung kepada orientasi religius (Spykman, 1926: 408).

Para pemimpin politik Islam berpartisipasi dengan para pemimpin sarjana Indonesia lainnya dalam negosiasi dengan Jepang untuk kemerdekaan dan menuntut sebuah tempat untuk Islam di Republik baru (Guan, 2006: 15). Islam politik telah menyertai Indonesia sejak awal perjuangan nasional untuk kemerdekaan. Organisasi nasionalis yang tersebar luas adalah Sarekat Islam (Asosiasi Islam), meskipun termasuk komunis dan juga organisasi lainnya (Sacks, 2009: 6).

Selain liga Islam ini yang muncul pada tahun 1912, ada banyak organisasi budaya dan ekonomi Islam, seperti Muhammadiyah modernis yang juga didirikan pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (perkumpulan ulama) yang ada pada tahun 1926 - semuanya berkontribusi terhadap Identitas nasional Indonesia (Ramage, 2005: 4). Sebagai penggerak massa awal, bagaimanapun, mereka mengkonsolidasikan gerakan sosial dan memperkuatnya yang kemudian dikenal sebagai aliran (aliran) (Ufen, 2006: 6).

Sebaliknya, persatuan negara terancam pada tahun 1950 oleh pemberontakan politik regionalis di Indonesia Timur dan Sumatera yang menyebabkan terjadinya gerakan Darul Islam, yang berjuang untuk sebuah negara Islam (Weatherbee, 2002: 24).

Organisasi Darul Islam bersama dengan kelompok Indonesia lainnya berjuang melawan kolonial. Niat Darul Islam adalah penciptaan negara Muslim, kemenangan kemerdekaan merupakan fase strategis dalam pembentukan negara teokratis. Menggunakan kekerasan menghadapinegara adalah tujuan utama organisasi ini, yang menjadikannya gerakan sentral di Jawa Barat.

Munculnya gerakan ini dihadapkan pada eksistensi sekulerisme dan pemerintahan pusat Indonesia sendiri (Vandenbosch, 1992: 183). Memang, gagasan negara Islam tetap tidak populer di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk kelompok Muslim arus utama (Lanti, 2002: 1).

Selain itu tidak populer, namun pemberontakan tersebut didukung oleh banyak kalangan di seluruh provinsi, termasuk daerah dataran tinggi yang berbeda secara etnis. Itu adalah sebuah pemberontakan atas nama otonomi daerah yang terus berlanjut dan untuk perlindungan Islam karena agama itu adalah penghuni negara(Bowen, 2007: 10).

Konflik nasionalisme antara sekuler dan Islamis semakin meningkat sementara pemimpin nasionalis sekuler yang dipimpin oleh Sukarno menolak dan dikompromikan dengan menyusun Piagam terpisah yang memerintahkan umat Islam untuk mematuhi hukum Islam (hukum syariah). Kekecewaan dengan penolakan Islam di Republik baru menyebabkan lebih banyak Muslim militan untuk meluncurkan perang gerilya

beberapa tahun agar terbentuknya Indonesia sebagai *Darul Islam* (Guan, 2006: 15).

Pada tahun 1950an, nasionalis sekuler, demokrat gaya barat, teknokrat angkatan bersenjata, dan sosialis semuanya bersatu dalam oposisi mereka terhadap bentuk pemerintahan Islam manapun. Setelah penghancuran organisasi partai sosialis dan partai demokratik, varian pandangan nasionalis konservatif ini menjadi dasar bagi dua puluh tahun terakhir kebijakan orde baru (Hefner, 2002: 7).

Terutama, perdebatan mengenai peran Islam, dan terutama pendirian konstitusional hukum Islam, berkecamuk menjelang tahun-tahun awal Republik, menghadapi kelompok politik Islam melawan nasionalis (dipimpin oleh Sukarno) dan komunis (Sacks, 2009: 6). Supomo berargumen bahwa negara Islam tidak cocok untuk Indonesia dengan alasan: Pertama, terlepas dari kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia adalah Muslim, Indonesia bukanlah negara Timur Tengah yang memiliki budaya dan nilai Islam yang sama (apa yang Supomo sebut sebagai *Corpus Islamum*).

Indonesia memiliki lebih banyak komunalitas (secara kultural dan politik) dengan negara tetangga Asia Timur dan Tenggara, yang bukan merupakan bagian dari peradaban Islam; Kedua, usulan untuk mendirikan sebuah negara Islam tidak akan pernah menempatkan minoritas agama Indonesia (Kristen, Hinduisme dan Budhisme) dalam pijakan yang sama dengan penduduk lainnya yang beragama Islam.

Perlu dicatat bahwa satu-satunya negara yang menjamin hak semua tradisi keagamaan adalah negara sekuler, sehingga Supomo berkeras bahwa Indonesia harus didirikan berdasarkan negara sekuler (seperti Turki pada tahun 1924) (Arifianto, 2009:

23-4).

Strategi pertengkaran kemudian menjadi cara populer untuk menengahi minat umat Islam. Perdebatan muncul karena demokratisasi menghasilkan ekspektasi meningkatnya jumlah anggota mayoritas Islam bahwa pemerintah pada akhirnya akan memberikan pengakuan dan status penuh terhadap nilai dan kepentingan Islam sebagai unsur inti dari persatuan nasional negara (Brown, 2001: 5).

Para pemimpin Kristen menantang untuk berpisah dari Indonesia dalam hal ini adalah orientasi untuk mendirikan negara Islam. Mantan Wakil Presiden Hatta khawatir bahwa sebagian besar warga Kristen Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan Republik kesatuan jika negara baru tersebut tampaknya mendukung Islam, bahkan secara tidak langsung, karena ini adalah fondasi utama nasional (Ramage, 2005: 4).

Selain itu, secara sosial dan politik, ada perbedaan ideologi antara Muslim, seperti Muslim abangan (sinkretis yang menekankan kepercayaan animistik), Santri (pengikut Islam yang lebih murni) dan Priyayi (yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya aristokrat Hinduis (Clifford Geertz dalam Ufen , 2006: 7).

Dengan kata lain, perkembangan yang tidak biasa di Indonesia adalah bahwa aliran dominan kebangkitan bersifat moderat, tidak radikal secara sosial atau radikal secara politis. Beberapa pemimpin Islam baru yang paling menonjol dididik di Amerika Serikat, sebuah pola yang relatif jarang terjadi di tempat lain di dunia Muslim, setidaknya bagi intelektual Muslim (Hefner, 2002: 6).

Oleh karena itu, gerakan nasionalis Indonesia didominasi

oleh Muslim yang lebih sekuler, dengan kata lain, Muslim sekuler Indonesia membentuk konsep nasionalisme Indonesia (McIntyre, 1973: 79). Oleh karena itu, ambisi untuk menciptakan Indonesia menjadi negara Muslim tidak hanya menantang Muslim yang sangat moderat pada umumnya, tapi juga banyak kelompok minoritas agama lainnya, karena selain Muslim, negara ini memiliki sekitar tiga juta orang Kristen, satu juta setengah Hindu Bali, Dan dua juta keturunan etnis Tionghowa.

Jika Indonesia benar-benar diadopsi sebagai negara Muslim, konsekuensinya adalah mengesampingkan West New Guinea yang berdomisili oleh Mayoritas orang Kristen dan kelompok minoritas lainnya akan memberikan perlawanan substansial terhadap tindakan semacam itu (Vandenbosch, 1992: 184).

Menanggapi gerakan gerilya Islam ini, pada tahun 1957, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Republik memutuskan dengan darurat militer dan kembali menggunakan konstitusi bentukan Jepang, pada tahun 1945 dengan hal itu tersirat pada penggunaan kekuasaan dan kekuatan Presiden. Keadaan kuat yang muncul harus didasarkan pada kepemimpinan yang kuat dan militer yang koersif dijiwai dengan semangatnya adalah fungsi ganda yang menggabungkan tanggung jawab keamanan dengan peran politik dan sosial nasional (Weatherbee, 2002: 24).

Indonesia telah mengalami bentuk pemerintahan parlementer, di mana, elit politik membentuk sebuah Konstitusi alternatif yang dikenal sebagai Konstitusi 1950, namun percobaan dengan demokrasi parlementer ini tidak berdaya setelah pemilihan 1955 gagal menghasilkan mayoritas yang jelas (Guan, 2006: 12).

Kemudian Sukarno merencanakan kemampuan negara untuk tetap bersama dengan upaya menciptakan “komunitas

imajiner” dalam populasi yang beragam dan tersebar (Anderson dalam Sachs, 2009: 5). Seperti yang terwujud dalam pernyataan negara bagian adalah ayah dan ibu adalah Indonesia (tanah air), bersamaan dengan doktrin “wawasan kepulauan” (wawasan nusantara), yang memberikan kesamaan dengan takdir nyata untuk wilayah Indonesia sesuai dengan komunitas imajiner masyarakat Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau (Hoey, 2003: 111).

Kembali ke UUD 1945 berarti memberdayakan Presiden eksekutif yang berkuasa untuk mengelola sebuah negara kesatuan yang kuat. Ini tidak terlepas dari pengaruh negara kolonial yang akhir dan terbukti dalam ketentuan konstitusi sementara ini. Ketentuan yang merupakan gema administrasi sentral yang kuat, pemerintah daerah atau pemerintahan teritorial Belanda memastikan kerja sama penduduk asli untuk bekerja demi ketenangan dan ketertiban negara kolonial (Guan, 2006: 11-12).

Tidak terlewatkan, demokrasi terpimpin juga diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1959, dengan menunjukkan bahwa penduduk Indonesia secara tradisional menggunakan metode pengambilan keputusan unik mereka sendiri (Musyawarah) berdasarkan sebuah konsensus (mufakat), dia menambahkan bahwa prinsip barat tentang peraturan mayoritas yang dipraktekkan pada tahun 1950-an tidak sesuai untuk Indonesia karena membuat kehendak ‘setengah-satu-plus’ yang keseluruhan (Nishihara: 394).

Dengan demikian, demokrasi parlementer dirusak oleh aparat keamanan dan Soekarno. Pembiasan tentara terhadap demokrasi parlementer ditunjukkan pada tanggal 17 Oktober 1952 ketika unit-unit tentara berdemonstrasi melawan usaha parlemen untuk mengatur dan merasionalisasi militer, yang

mereka anggap sebagai usaha untuk mengurangi kekuatan dan kepentingan mereka yang tumbuh dari perjuangan revolusi mereka (Guan, 2006: 3).

Nasionalisme adalah sebagai bentuk penegasan, yaitu Pancasila (lima prinsip negara) dipaksakan untuk dipelajari di kalangan mahasiswa, bidang pendidikan politik, aparatur pemerintah, dan pemimpin politik yang juga tidak dikecualikan dari hal tersebut, semua unsur masyarakat diwajibkan untuk memahaminya. Sebagai bentuk penegasan dan pembenaran bahwa Pancasila merupakan falsafah nasional negara dan alat unifikasi bangsa (Drake, 1992: 297).

Pengenalan ideologi politik formal ini dianggap sebagai pengganti tradisi daerah dan norma adat Indonesia. Pancasila dianggap sebagai nilai integrasi ideal, ideologi Indonesia yang ideal dan sesuai dengan dasar-dasar baru. Ini tentang kewilayahan negara berdaulat teritorial (Arifianto, 2008: 18).

Penegasan Pancasila sebagai visi identitas nasional oleh para pemimpin nasionalis Indonesia yang melapiskan kesatuan ideologis mengenai keragaman sosial dan politik dianggap sebagai marginalisasi Islam (Brown, 2001: 3). Keberadaan Pancasila didukung oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok Protestan dan Katolik. Kelompok-kelompok ini menganggap Pancasila sebagai istilah asli kompromi politik (Ramage, 2005: 6).

Untuk menyatukan daerah-daerah yang terfragmentasi, baik Sukarno dan Suharto menegakkan dan menafsirkan Pancasila dalam tiga cara yang saling tumpang tindih. Pertama sebagai negara kesatuan, kesatuan yang kepentingan umum menuntut pembatasan hak kewarganegaraan individu; Kedua, karena bangsa budaya etno yang dibangun secara historis di sekitarnya

adalah inti status, kaum bangsawan, bangsawan (priyayi), elit Jawa; Ketiga, sebagai negara multikultural dimana keragaman menuntut pengelolaan korporat, sehingga 'kesatuan' dalam keragaman '(Bhinneka Tunggal Ika) menjadi slogan ideologis yang membenarkan pemusatan administratif (Brown, 2001: 3-4).

Bagi nasionalis, Pancasila sebagai ideologi Indonesia bertemu dengan dua hal penting: Pertama, ini dianggap sebagai forum, sebuah titik temu untuk semua partai dan kelompok yang berbeda, sebuah *common denominator* dari semua ideologi dan aliran pemikiran yang ada di Indonesia. Kedua, hanya ditafsirkan sebagai ideologi politik yang menjamin persatuan nasional dan sesuai dengan kepribadian Indonesia, dan oleh karena itu, satu-satunya negara dasar yang tepat untuk Indonesia (Nasution dalam Ramage, 2005: 6).

Bagi umat Islam yang fanatik, menganggap Pancasila telah melemahkan agama di Indonesia, agama telah diremehkan, tertindas, dimanipulasi, dan dengan sengaja ditundukkan demi kepentingan negara. Meskipun pemerintah sementara telah berhasil mengintegrasikan semua agama melalui Pancasila, semua agama ini ditundukkan dalam prinsip tinju negara, yaitu kepercayaan pada satu dewa tertinggi, namun Sukarno dan juga Suharto menangani umat Islam sebagai tantangan abadi dan utama untuk meradikalisasi integritas nasional (Drake, 1992: 297).

Negara kesatuan adalah instrumen lain untuk membentuk Indonesia yang bersatu dan juga nasionalisme. Elit politik di Indonesia pada umumnya mendukung pembentukan negara ini sebagai negara kesatuan, bukan federalisme, karena asumsi bahwa Indonesia memiliki pengalaman pahit sementara Belanda kolonial telah mempraktekkan sistem federal dalam

pra kemerdekaan dan beberapa tahun setelah kemerdekaan (Bertrand, 2002: 8). Serta sebuah negara kesatuan, mewujudkan sebuah proses yang cenderung menciptakan satu negara Indonesia, disambut dengan sangat kuat oleh sebagian besar provinsi di Indonesia (Lane, 2002).

Kelompok etnis mayoritas Indonesia (Jawa) sangat percaya pada konsep identitas negara dan masyarakat. Perspektif Jawa adalah bahwa tidak ada warga negara di luar negara bagian. Negara yang dibayangkan sebagai inti yang berputar di dekatnya adalah pemimpin, yang dianggap paling berkuasa daripada kekuatan lainnya, yang bisa mendelegasikan semua legitimasi kepentingan nasional.

Dengan demikian tujuan utama sang pemimpin adalah mempertahankan sentralisasi kekuasaannya. Konsep kekuasaan ini tidak memberi ruang bagi etnis lain di luar Jawa, yang diharapkan selalu di bawah subordinasi dan bergantung pada kepentingan pemimpin pusat (Kreuzer, 2004: 18). Meskipun, sistem pemerintahan federal mungkin lebih mengakomodasi untuk menyatukan kelompok multi etnis ini, Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai implementasi permanen di masa depan, karena kedalaman keragaman yang luar biasa.

Sebagai tambahan, sistem federal ini telah diadopsi oleh kolonial Belanda awal untuk tujuan neokolonialis, dan hal tersebut memberi stigma negatif bagi Orde Lama Sukarno yang akhirnya menggeneralisasi penolakan federalisme terhadap elit politik (Wanandi, 2002: 136). Bagi banyak etnis minoritas, negara kesatuan, daripada menjadi ekspresi nasionalisme Indonesia, dipandang sebagai kendaraan untuk dominasi pemerintah pusat. Terdiri hampir setengah dari total populasi, masyarakat Jawa adalah kelompok etnis tunggal terbesar di Indonesia. Kontrol

administratif pemerintah pusat Jakarta atas basis sumber daya pulau-pulau terluar dianggap sebagai imperialisme Jakarta (Weatherbee, 2002: 23-24).

Terlebih lagi, pemerintah pusat tidak menyadari gagasan pembagian kekuasaan, di sisi lain, secara kuat mengadopsi pemusatan kekuasaan sebagai konsep kekuasaan mereka. Jadi, pertanyaannya muncul mengapa pemerintah pusat menolak federalisme pemerintah, karena sistem federal menjamin distribusi kekuatan yang sama, yang akhirnya melawan pemikiran Jakarta tentang kekuasaan terpusat dan tidak dialihkan (Kreuzer, 2004: 19).

Presiden Sukarno dan Suharto membahas masalah persatuan dengan mengadopsi sistem otoriter. Kedua presiden tersebut berusaha memperkuat peran Jakarta sebagai pengelola berbagai daerah. Melalui profil karismatik dan pesona, Sukarno pada awalnya mencoba menyelesaikan tugas ini, di mana dia akhirnya beralih ke otoritarianisme dan kekuatan militer untuk menyelesaikan beberapa konflik (Wanandi, 2002: 136).

Dalam mempromosikan nasionalisme di dalam negeri, hampir semua pemimpin di Indonesia masih dipengaruhi oleh metode penjajahan. Rencana migrasi misalnya. Transmigrasi telah dikejar sebagai strategi untuk mempromosikan visi nasionalis dan narasi wilayah dan budaya melalui pembangunan masyarakat yang disengaja atas nama kemajuan pembangunan. Permukiman transmigrasi dimaksudkan untuk mewujudkan realisasi model kehidupan desa dan masyarakat tertentu yang dikandung dalam rekayasa sosial/spasial birokrasi Indonesia (Hoey, 2003: 110).

Transmigrasi juga memiliki dua tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura, sambil

menyediakan beberapa lahan di daerah yang kurang ramai untuk pemukim petani (Blaskett, 2006: 5). Berdasarkan alasan tersebut dan ketidakseimbangan abadi dalam distribusi penduduk antara pulau-pulau bagian dalam Jawa, Bali dan Madura dan seluruh nusantara.

Selain masalah kepemilikan tanah, baik Sukarno dan Suharto memperpanjang kebijakan pemindahan penduduk ala Belanda. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menyebarkan populasi, yang sebagian besar terdiri dari etnis Jawa, lebih merata di seluruh wilayah dan untuk mengintegrasikan seluruh populasi negara tersebut dengan mengumumkan budaya alami yang homogenisasi (Hoey, 2003: 111).

Belajar dari rezim Orde Lama Sukarno, rezim otoriter Orde Baru Suharto mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, di mana kedua instrumen politik ini disahkan di atas fondasi negara kesatuan dan kondisi negara maju untuk mencapai integrasi nasional. Implementasi hukum Islam menjadi ancaman bagi Orde Baru, karena Jakarta memperlakukan setiap kebangkitan regional yang mendukung ideologi Islam dengan penekanan negara dan solusi senjata. Tidak pernah kurang, mengajarkan kurikulum Islam yang menentang kurikulum sekuler negara juga dilarang pada periode tersebut (Bertrand, 2002: 20).

Negara Orde Baru Suharto ditekankan pada keamanan dan stabilitas, sebagai karakter yang menentukan dari negara bangsa Indonesia. Itulah yang sekarang dirasakan sebagai kekhilafan terhadap revolusi Indonesia dan sebuah parodi dari apa yang dilambangkannya (Guan, 2006: 8). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Soekarno dan Suharto dalam memobilisasi nasionalisme.

Karena dia adalah pendahulunya, Soeharto terutama

menggunakan tentara sebagai jalur kedua kewenangan untuk memusatkan sistem politik dan birokrasi. Sebagai hasilnya, otonomi daerah yang luas kini telah menjadi isu penting dalam agenda nasional. Pemerintah tidak bisa memaksakan kesatuan Indonesia sendirian. Pada akhirnya, sistem politik yang terhambat oleh kekerasan dari pusat di Jakarta hanya akan mendorong pemberontakan dan pemberontakan (Wanandi, 2002: 136).

Dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, rezim Orde Baru Suharto menerapkannya adalah kontrol atas strategi-strategi kebijakan pembangunan negara. Pada saat itu, kebijakan tersebut hanya menekankan pada 'kesatuan dalam keragaman'. Sebaliknya, praktis ada berbagai batasan di bawah rezim otoriter ini, semacam keragaman budaya di seluruh wilayah diizinkan dan dipromosikan namun terbatas. Tidak hanya pembicaraan di depan umum ini yang membahas tentang etnisitas, agama, ras, kelompok dan segala hal yang menyebabkan kebangkitan identitas kelompok, telah dilarang keras (Bowen, 2005: 153-4).

Negara bangsa Orde Baru dianggap sebagai reemergensi tatanan feodal, yang sebelumnya dipraktikkan oleh Belanda di kerajaan adat yang mereka sebagai actor penaklukan. Demikian pula, kerja keras dan hasil panen rakyat serta tanah yang diambil alih oleh Orde Baru untuk semata-mata kepentingan pusat. Banyak warga yang telah menjadi korban akibat dari pengangkatan negara feodal Orde Baru (Guan, 2006: 8-9).

Rezim otoriter secara sistematis merancang setiap aspek sarana nasional, mulai dari nilai budaya, pendidikan, pembangunan ekonomi, bahasa dan kegiatan politik dipandu oleh pemerintah pusat, agar dapat berjalan dengan lancar menjadi nilai nasional yang sama. Selama hampir tiga puluh tahun itu menguntungkan secara relatif stabilitas politik. Namun setelah

runtuhnya rezim Orde Baru, tampak bahwa nilai dan prinsip bersama ini membawa tuntutan regional etno serta pertanyaan model nasional pemerintah pusat.

Khususnya provinsi, seperti Timor Lorosaë, Irian Jaya, Aceh, Maluku dan Riau yang selama berpuluh-puluh tahun telah terpinggirkan, kemudian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berniat untuk menetakannya sebagai negara merdeka dari Indonesia (Bertrand, 2002: 11). Orde Baru menciptakan aktivitas politik Indonesia dan kehidupan sosial sehari-hari berdasarkan kerangka kerja yang mengarah kepada kerangka klien, persatuan nasional sangat berkaitan dengan hubungan antar kerangka kerja ini.

Aturan negara sebagai negara patrimonial dan pelindung utama yang berjalan, itu berfungsi agar bisa menyalurkan sumber daya ke hirarki hubungan klien patron dengan tingkat kabupaten di berbagai provinsi. Maka persatuan nasional Indonesia bisa tercapai. Tetapi pemerintah pusat cenderung hanya mendistribusikan sumber daya ke klien-klien yang hanya dekat dengan ibu kota negara, yang membuat klien sub-cabang lain di luar Jakarta merasa bahwa mereka mulai dikeluarkan dari pendistribusian sumber daya. Ketika ini terjadi, klien sub patron ini menarik dedikasi mereka dan membatasi hubungan mereka dengan pemerintah pusat (Brown, 2004: 5).

Setelah menggantikan Soekarno, rezim Orde Baru Soeharto membuat Indonesia ditantang oleh dua puluh satu pemberontakan provinsi sejak lebih dari dua dekade kemerdekaan (Drake, 1992: 297-8). Akibatnya, pemerintah pusat mengeksploitasi sumber daya ekonomi daerah, dan memperkuat kontrol tingkat nasional yang terpusat, diikuti oleh pembatasan besar pada program pemerintah provinsi dalam mengatur sumber daya ekonomi

dan alam mereka sendiri dan juga agenda politik lokal mereka (Arifianto, 2008: 6).

Akhirnya, pulau-pulau terluar Jawa menyadari eksploitasi terstruktur ini. Bentuk perspektif mereka bahwa sejarah Indonesia tidak lebih dan tentang pengeringan sumber daya mereka untuk mendukung sebuah pemerintah pusat yang miskin. Revolusi tampak agak berbeda dengan pulau terluar. Nasionalisme tidak mempengaruhi wilayah ini sampai pada tingkat di Jakarta (Guan, 2006: 18-19).

BAB VII

ETHNO NASIONALISME ACEH

Di Indonesia, isu tuntutan politik Islam terhadap negara digambarkan dengan jelas dalam pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintah pusat antara tahun 1948 dan 1962. Serangkaian pemberontakan bersenjata terinspirasi Islam yang ada di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh benar-benar ditumpas oleh Angkatan Darat Indonesia (Ramage, 2005: 6).

Di Eropa, nasionalisme adalah interpretasi situasi ini, terlepas dari konteks politik atau ideologisnya. Hal ini cukup jelas, bahkan pada tingkat fenomenologis, bahwa nasionalisme adalah ideologi politik yang penting, dasar untuk interpretasi historis dan sumber legitimasi pemerintah berbagai negara ini. (Puhovski, 2004: 212). Dengan demikian tidak dipungkiri bahwa Indonesia mengadopsi pemahaman Eropa seperti itu adalah nasionalisme nasional.

Komunitas etnis telah lama menjadi pola sosio-kultural untuk organisasi dan komunikasi manusia, ia memiliki seperangkat tradisi yang unik untuk dirinya sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain. Tradisi semacam itu mencakup bahasa atau mitos umum tentang kesamaan atau tempat asal, praktik budaya di tingkat kabupaten dan rasa kontinuitas historis. Hubungan primordial ini menghasilkan rasa identitas etnik dan solidaritas yang kuat dan mendorong munculnya nasionalisme etnis (Thaib,

2000: 1).

Elit politik Indonesia mengatur Indonesia sebagai negara yang masih kurang demokratis. Keanekaragaman etno-budaya harus dihapus. Perbedaan etnis harus diubah menjadi New Indonesia yang baru dibentuk (Indonesia Raya). Pembangunan negara dianggap sebagai agenda penting utama dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa terpadu. Tujuan ini dapat dicapai dengan de-politisasi semua identitas regional dan etnis dan memaksakan perbedaan ini di bawah satu kesatuan Indonesia. Bagaimanapun, strategi ini tidak didasarkan pada prinsip etnik maupun identitas agama, namun wilayah tersebut merupakan target utama pembentukan nasionalisme (Kreuzer, 2004,: 20).

Oleh karena itu, Indonesia telah menegaskan kebijakan integratif untuk mengembangkan hubungan di antaranya adalah multi etnis dan penghuni lainnya. Untuk mendukung kebijakan integratif ini, maka pemerintah pusat tidak hanya mengendalikan agenda politik regional, tapi juga agenda keaksaraan, seperti pendidikan. Tidak terlewatkan juga, bahwa program transportasi dan komunikasi harus dikenai pengamatan sentral.

Yang lebih krusial adalah pembangunan ekonomi di sub-wilayah secara sengaja membuat pengaturan yang saling tergantung (*dependent*), dan program transmigrasi telah memainkan cara lain untuk menyebarkan peran nasionalisme tersebut, dengan memindahkan penduduk kelompok etnis Jawa yang dominan ke daerah-daerah (pinggiran), Dan juga untuk melindunginya sebagai tujuan keamanan teritorial (Drake, 1992: 296).

Bahayanya jelas, bahwa etnik mayoritas mulai mendominasi seputar visi *etno cultural* negara yang memfasilitasi status

mayoritas lebih tinggi daripada etnis minoritas lainnya, sementara dalam istilah mereka, etnis minoritas mulai memobilisasi sekitar multi nasionalis. Visi yang mengutamakan hak-hak etnik minoritas (Brown, 2007: 7).

Kelompok etnis mayoritas di Indonesia mengklaim diri mereka unggul dalam setiap aspek, baik secara kultural, politik, ekonomi dan sosial namun tidak menunjukkan kebersamaan dalam memperlakukan eksistensi minoritas (Drake, 1992: 302). Apalagi nasionalisme Indonesia dipusatkan pada kesatuan bangsa, berarti kesatuannya adalah rakyat (rakyat). Kesatuan ini diamati tidak hanya sebagai kekuatan politik yang aktif namun sebagai unsur bangsa yang namanya tindakan politiknya dibenarkan (Lanti, 2002: 201).

Strategi dominasi nasionalisme etnis mayoritas dan sistem sentralisasi pemerintahan telah memberi ruang lebih besar untuk menghidupkan kembali gerakan penentuan nasib sendiri di wilayah Indonesia. Alasannya adalah bahwa Indonesia telah sering mengenakan hak minoritas dan juga pemerintah pusat menciptakan konflik sosial dan politik lokal (Bowen, 2005: 155).

Akibatnya, tantangan vertikal muncul, seperti ada di Aceh, Papua dan Maluku, sementara ada tantangan horisontal antara warga Dayak dan warga Madura di Kalimantan Barat dan Tengah, dan antara kelompok agama (Kristen dan Muslim) di Maluku dan Sulawesi Tengah. Selain itu, ada juga kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa, terutama pada tahun 1998, dan antara agama-agama lain, kelompok regional dan politik (Kingsbury, 2002: 69).

Dalam contoh tiga kasus - Aceh, Timor Timur dan Papua Barat, ada gerakan separatis berdasarkan persepsi perbedaan etnis, namun dalam masing-masing kasus, negara pusat lebih mendahulukan penyelesaiannya mengandalkan lewat solusi

militer (Turner, 2005: 188-89). Daerah-daerah ini menolak kedaulatan Indonesia yang berbasis di wilayah Hindia Belanda (Hindia).

Dengan mengklaim bahwa negara penerus tidak mewakili kesepakatan (Timor Lorosa'e, Papua Barat dan Aceh) atau di mana negara pendahulu/penerusnya dipahami sendiri sebagai tidak sah (Misalnya NEI), klaim yang sah ini sulit dipertahankan dengan kelompok nasionalis intra-negara tertentu (Kingsbury, 2002: 70). Dengan demikian berdasarkan kekhasan etnik ini, permintaan untuk separatisme regional sangat didukung oleh gerakan etno-nasionalisme.

Konflik etnis nasionalis secara intensif muncul setelah jatuhnya mantan presiden Soeharto, diikuti oleh perselisihan regional antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk Aceh dimana konflik tersebut kembali muncul dan dipertemukan kepada keinginan untuk berpisah. Gerakan nasionalis etno ini mendapat dukungan tidak hanya dari penduduk setempat, namun sangat didukung oleh kelompok pemberontak separatis.

Munculnya gerakan etno-nasionalis ini karena model nasional Indonesia, khususnya instrumen yang diterapkan selama rezim Soekarno maupun Suharto. Bukan hanya model ini yang dikecewakan dan tidak sesuai dengan identitas kelompok namun ini berarti implementasi pola ini sudah sejak lama ditolak. Rezim Orde Baru mengerahkan alat pemaksa dalam membangun persatuan dan memengaruhi pembangunan persatuan inilewat visi tentang warga negara dan mengikis oposisi (Bertrand, 2002:11-12).

Kepentingan regional Aceh di Aceh itu sendiri cenderung memiliki kondisi pra-kolonial, dimana Aceh ditingkatkan atau

diperburuk oleh proses kolonial dan pasca kolonial. Hal ini bisa dikatakan mencakup dorongan identitas regional untuk tujuan pembagian dan peraturan. Penggunaan tentara dari satu daerah melawan warga-warga lain, dan melalui relokasi loyalis ke daerah-daerah di mana kesetiaan nasionalismenya dicurigai, seperti Aceh, seringkali dengan cara menghilangkan kecurigaan ini dengan tekanan populasi di wilayah pusatloyalis (migran) (Kingsbury, 2002: 70).

Salah satu pilihannya adalah, Indonesia berusaha mengintegrasikan masyarakat Aceh, dengan meluncurkan program transmigrasi, mengangkut ribuan orang daripula Jawa dan Madura ke Aceh Selatan dan Barat, dengan sedikit keberhasilan secara ekonomi, namun mungkin dengan harapan akan muncul dampak jangka panjang terhadap masyarakat lokal (Blaskett , 2006: 5).

Dengan demikian, kaum etno-nasionalis Aceh membuat pilihan mereka untuk menuntut kemerdekaan setelah lama menderita karena dikecualikannya dari kerangka patronase negara pusat, diikuti oleh kegagalan negara dalam menawarkan dengan yang menjadi tuntutan dari etnis-nasionalisAceh ini dan kemudian menyebabkan kekecewaan sepenuhnya terhadap pemerintah pusat berdasarkan hal tersebut. Kasus Aceh dengan mulai menolak kekuasaan yang diberikan oleh Jakarta dan sedikit sumber daya yang diterima dari pusat (Brown, 2004: 6).

Meskipun tidak ada korespondensi langsung antara konflik di Aceh dan kebangkitan nasionalisme Aceh. Lebih dari dua dekade warga Aceh telah menyumbangkan usaha mereka untuk mengakhiri kualitas yang dipraktikkan oleh berbagai rezim pemerintah pusat Indonesia dalam bentuk solusi militer. Aceh merupakan hasil dari pengalaman penindasan yang ada

sehingga menjadikannya marak akan nasionalisme kontemporer (Aguswandi).

Seperti yang telah dibahas pada kajian-kajian sebelumnya, pada abad keenam belas, Kesultanan Aceh menguasai sebagian besar Sumatera dan beberapa bagian di Malaya. Belanda kolonial menghadapi berbagai kesulitan dalam menaklukkan tanah Aceh di akhir abad kesembilan belas dan wilayah Aceh sebagian berada di bawah kendali militer Belanda sampai tahun 1942 sementara Jepang menyerang Indonesia. Secara umum, kolonial Belanda mampu mencapai hampir semua bagian Indonesia lainnya kecuali Aceh. Pendudukan Aceh oleh Belanda menyebabkan eksistensi nasionalis Aceh (Bowen, 2005: 159).

Selama masa Kesultanan di Aceh, Aceh memiliki banyak batas pra-kolonial, yang meliputi penaklukan sampai Pahang di pantai timur Semenanjung Malaysia, dan ini masih tertera di perbatasan pasca-kolonial (He & Reid, 2004: 294). Dalam tradisi politik Aceh, negara ditafsirkan sebagai wali, hak-haknya adalah warga negara, termasuk hak untuk menjalankan agama mereka tanpa halangan. Hal ini mencerminkan peran tradisional kepala negara, baik sultan maupun wali naggroe (penjaga negara) (Kingsbury: 4).

Sebelum invasi Belanda ke Aceh, Aceh secara politis, sosial, ekonomi dan budaya terhubung erat dengan Samudra Hindia dan Semenanjung Malaya, serta Aceh dengan bangga menjadi negara merdeka sebelum pemindahan kekuasaan dari kerajaan kolonial Belanda ke republik Indonesia. Sebaliknya, masyarakat Aceh tidak mengenal pemindahan kekuasaan ini dan menyalahkannya sebagai proses ilegal.

Pergeseran kekuasaan ini dianggap sebagai pelanggaran hak kedaulatan Aceh. Di sisi lain, nasionalis Indonesia menafsirkan

Aceh telah berbagi dalam jumlah besar sejarah perjuangan kolonial berjuang melawan Belanda, yang mengkonsolidasikan dan mengintensifkan identitas Indonesia (He & Reid, 2004: 294).

Munculnya perasaan etno-nasionalis di Aceh, berasal dari konsepsi Indonesia, yang sebelumnya didukung oleh warga Aceh, masyarakat Aceh sepenuhnya mendukung revolusi pemerintah Indonesia melawan penjajahan Belanda pada tahun 1945. Sejak awal, penduduk Aceh mendapat permintaan Nasionalisme Islam yang akan diadopsi untuk Indonesia setelah kemerdekaan.

Sebaliknya, mantan presiden Sukarno, memutuskan nasionalisme sekuler sebagai landasan fundamental Negara. Berawal dari keputusan ini, rakyat Aceh dan merupakan pemimpin ulama yang terlibat sebagai pemberontakan Islam (Darul Islam) yang berawal dari gerakan pemberontakan Jawa Barat.

Penduduk Aceh telah membentuk perasaan identitas kelompok yang kuat yang sayangnya tidak pernah sepenuhnya diakui oleh pemerintah pusat mengenai identitas yang bersangkutan (Bertrand, 2002: 19). Selain itu, kemunculan gerakan penentuan nasib sendiri di Aceh telah didorong oleh meningkatnya pelanggaran kedaulatan Aceh sejak tahun 1950an (Lane, 2002).

Daud Beureueh adalah salah satu pemimpin Aceh yang memimpin rakyat Aceh untuk berperang melawan Belanda, sampai Hindia Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada pemerintahan Sukarno. Beberapa tahun setelah kemerdekaan, Daud didukung integrasi penuh Aceh ke dalam negara bangsa yang baru di Indonesia dengan memberikan Aceh sebuah wilayah khusus.

Namun pada tahun 1953, Daud memimpin pemberontakan di Aceh mengkritik pemerintah pusat di Jakarta (Aguswandi). Warga Aceh telah memiliki kekuatan politik kecil dan sedikit ruang untuk mempraktikkan keyakinan religius mereka dan kekhasan budaya mereka dalam ruang lingkup dan model nasionalisme Indonesia (Bertrand, 2002: 21).

Bertentangan dengan historiografi resmi Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berpendapat bahwa Aceh tidak secara sukarela bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1945 namun digabungkan secara ilegal (Schulze, 2004: 6).

Sebenarnya, masyarakat Aceh memperlakukan Indonesia tidak lebih sebagai negara intim, khususnya dalam integrasi nasional dan juga nasionalisme Indonesia, sebaliknya, Indonesia kemudian menganggap gerakan separatis Aceh sebagai ancaman pahit dan paling berbahaya daripada kekuatan Belanda (Mabry, 2005: 14).

Indonesia memperlakukan berbagai ketentuan untuk minoritas yang berbeda. Meskipun demikian, negara ini terbagi menjadi dua puluh tujuh provinsi pada saat itu. Sebaliknya, Jakarta dan Jogjakarta lebih berkembang karena kedua kota ini merupakan bagian dari wilayah sentral bagi pemerintah pusat. Suku minoritas etnis seperti Aceh menawarkan provinsi khusus terbatas, dan sisanya seperti masyarakat Batak, masyarakat Dayak Ambon dan Timorse diperlakukan sama sekali tanpa otonomi (Drake, 1992: 300).

Diperkuat oleh pemahaman nasionalisme etno-budaya rezim otoriter adalah instrumen yang berurusan dengan negara-negara lain di dalamnya adalah wilayah sebagai warga kelas bawah, baik mengecualikan mereka dari status kewarganegaraan dan hak penuh mereka, atau menggelar mesin negara untuk

melakukan asimilasi (Brown, 2001: 4).

Melihat ketidaksetaraan ini, masyarakat Aceh yang marah pada pemerintah pusat, tidak hanya berdasarkan dominasi pusat di posisi aparat negara dan provinsi yang paling krusial di negara tersebut, pemerintah pusat telah menduduki setiap aktivitas sehari-hari di Aceh, militer dan pegawai negeri berada di bawah reservasi mereka.

Terlebih lagi, perilaku militer menindas warga Aceh untuk keuntungan mereka. Karena Aceh juga kaya akan minyak dan gas bumi yang dianggap sebagai gas alam terbesar ketiga di Indonesia (Mabry, 2005: 13). Pemerintah Jakarta dianggap sebagai tempat inti hanya karena alasan itu merupakan keunggulan politik di atas sub-daerah (pinggiran), secara ekonomi, dibandingkan dengan daerah lain, Jakarta tidak memiliki investasi untuk pembangunan negara, dan juga tidak memiliki sumber daya alam (Drake, 1992: 113).

Karena provinsi Aceh memiliki sumber daya yang kaya, segera setelah temuan minyak dan gas di sana, permintaan suksesi semacam itu dapat muncul, sebagai tanggapan atas eksploitasi ranjau darat mereka di pusat (Brown, 2004: 5) Rezim Orde Baru sangat memaksakan kebijakannya untuk memberantas gerakan etno-nasionalis Aceh, penempatan militer adalah strategi terbaik.

Terlepas dari pendekatan represif dan metode pemaksaan yang diterapkan sebagai model nasional Indonesia di bawah Soeharto, terlepas dari pengecualian etno-nasionalis ini dapat dihapus atau dikurangi, sebaliknya, hal itu semakin menguat dan mendorong rasa etno-nasionalis di masyarakat Aceh. Kekecewaan besar model nasionalisme Jakarta menjadi bukti dukungan intensif untuk kemerdekaan, yang muncul saat Indonesia mulai menuju transisi demokrasi (Bertrand, 2002: 19-20).

Pemberontakan Gerakan Merdeka (GAM) terhadap pemerintah Indonesia dan saling mengklaim sejarah dan budaya suatu bangsa. Keduanya sangat berpegang pada kesamaan psikologi, bahasa dan biologi, dan keduanya menegaskan bahwa adalah pemahaman historis bahwa wilayah masa lalu harus mempertimbangkan pilihan wilayah dan identitas nasional saat ini (He & Reid, 2004: 294).

Kedaulatan Indonesia dan integritas teritorial telah banyak dikritik, terutama jalannya berusaha untuk melindungi mereka (Schulze, 2003). Warga Aceh merasa bahwa mereka tidak pernah dikenali penggabungan legitimasi mereka ke Indonesia, sebaliknya negara Jakarta-Indonesia sebenarnya menginvasi mereka (John R. Bowen: 159).

Untuk itu GAM memiliki dua alasan kedaulatan independen adalah: Pertama, Aceh adalah negara merdeka yang diakui secara internasional sebagaimana dicontohkan oleh perjanjian 1819 antara Sultan Aceh dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia atau perjanjian Belanda Anglo tahun 1824.

Dengan alasan ini, kedaulatan seharusnya dikembalikan ke Kesultanan Aceh dan bukan Republik Indonesia (Di tiro dalam Schulze, 2004: 6). Kedua, tidak ada referendum yang diadakan dengan rakyat Aceh atau Sumatrans, dan juga dengan wilayah kolonial terpisah lainnya, apakah mereka ingin bergabung dengan Republik Indonesia atau tidak.

Tidak ada dekolonisasi yang terjadi di Hindia Belanda. Hanya saja nama itu diubah menjadi Indonesia dengan Indonesia yang hanya merupakan ungkapan geografis, bukan nama yang tepat dari orang mana pun, atau negara manapun, atau pulau mana pun (Thaib, 2000: 4).

Ini tentu saja, adalah klaim Hasan Di Tiro, pemimpin dan pendiri GAM. Dia mengatakan bahwa Aceh tidak pernah menyerah kepada Belanda, dan hal itu tidak pernah secara legal merupakan bagian dari Hindia Belanda dan oleh karena itu bukan merupakan bagian dari penerusnya, Indonesia (Siegel, 2002: 223). Sukarno yang berasal dari keturunan Jawa dan Bali tidak terlihat mewakili rakyat Aceh, dan Aceh berjuang untuk merdeka dari negara baru Indonesia (Blaskett, 2006: 3), begitu juga Soeharto.

Dengan demikian, Di Tiro tidak pernah mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. “Bangsa Indonesia menyerap,” katanya. Ini hanyalah nama lain untuk Hindia Belanda dengan penguasa baru, pemerintah Jakarta dan bukan orang Belanda (Lintner, 1999: 18). Kesatuan ‘persatuan’ atau ‘kewarganegaraan’ Indonesia tidak memiliki legalitas hukum berdasarkan hukum dekolonisasi dan administrasi kolonialis yang berbasis di Jakarta dan secara sah tidak dapat menolak hak penentuan nasib sendiri dan memisahkan keberadaan hukum masyarakat Aceh, dan juga Kepada orang-orang lain dari wilayah penjajahan Belanda sebelumnya (Thaib, 2000: 2).

Apalagi, sementara identitas Indonesia adalah nasionalisme sipil yang termasuk multi agama, multi etnis, multi suku, nasionalisme Aceh bersifat etnik dan eksklusif. Hal ini didasarkan pada pengenalan identitas suku Aceh terhadap delapan atau sembilan suku lainnya di wilayah tersebut untuk menciptakan bangsa Aceh (Schulze, 2003). Aceh sendiri, terdiri dari sejumlah kelompok bahasa yang berbeda, dan di dalam mayoritas pembicaraan, Aceh merupakan pertentangan serius dan jangka panjang antara daerah (Bowen, 2007:11).

Bagi warga Aceh, penerapan jenis nasional Indonesia adalah

sebuah pemaksaan adapun permintaan masyarakat Aceh adalah model Islam untuk diterapkan di Indonesia (Bertrand, 2002: 24). Sifat pemberontakan dan perlawanan orang-orang Aceh terhadap Belanda sangat parah sehingga Belanda mulai melihat Aceh dalam istilah budaya yang luar biasa. Yaitu, memiliki penekanan kuat pada identitas religius, hampir berbatasan dengan fanatisme agama. Deskripsi tentang 'identitas budaya' yang luar biasa ini terus berlanjut sampai saat ini, mengacu pada kekhasan etnis dan keinginan sebagai daerah Islam (Daud dalam Sundararaman: 5).

Kasus Aceh selalu dikaitkan dengan junta nasionalisme. Menanggapi rezim orde baru, masyarakat Aceh telah menggunakan otoritas Aceh sendiri untuk memiliki pemahaman identitas etnik untuk melawan kediktatoran pusat. Dengan demikian, nasionalisme Aceh tampaknya dapat mempertahankan identitas mereka dari hegemoni Indonesia di wilayah ini. GAM telah berhasil mengurangi hegemoni Jakarta selama masa konflik, yang mengakibatkan banyak imigran luar telah meninggalkan Aceh.

Meskipun begitu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sering dicirikan sebagai organisasi Islam. Meskipun, ada pengaruh Islam yang jelas, GAM adalah organisasi nasionalis, tujuan politik yang secara eksplisit didasarkan pada wilayah dan bukan agama (Kingsbury: 1)). Hasan Di tiro menggambarkan perjuangannya sebagai nasionalis dan bukan Islam. Memang, dia mengatakan bahwa dia mempertahankan kontak dekat dengan gerakan separatis Kristen di Maluku dan Timor Lorosaè. "Pemerintah pusat adalah musuh bersama kita", katanya (Lintner, 1999: 19).

Bahkan saat ini, pada saat Indonesia menghadapi konsolidasi demokrasi, Aceh tidak menaruh minat pada proses demokrasi nasional ini, karena mereka telah membentuk pengalaman unik

dan unik yang menyatukan identitas mereka. Karena rakyat Aceh tidak mempercayai tawaran yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia (Bertrand, 2002: 21).

Hal ini didukung oleh Hasan Di Tiro yang mengatakan bahwa “Saya tidak ingin berbicara dengan mereka (pemerintah Indonesia). Tidak akan ada solusi sampai dan kecuali tentara pendudukan Indonesia meninggalkan Aceh (Lintner, 1999:18). Namun, bentuk pemerintahan terpusat di Indonesia telah menjadi tantangan bagi hampir semua wilayah regional, dan Aceh pada khususnya. Karena alasan ini, warga sipil terlihat meningkatkan kekerasan dan tuntutan separatist akan membuat Jakarta merasakannya sebagai model nasionalisme (Bertrand, 2002: 21).

Model nasional ini juga mengakibatkan separatisme Aceh sebagai hasil penjajahan internal Jakarta, karena penduduk Aceh merasakan banyak ketidaksetaraan yang mereka terima dari Jakarta dan tidak sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada pemerintah pusat (David Brown, 2004: 5). Kendati demikian, ada kelas menengah Aceh yang menuntut untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia, akan tetapi hendaknya Pemerintah pusat dengan memberikan otonomi yang besar serta wilayah tersebut menerima pembagian besar dalam pendapatannya menghasilkan banyak sumber daya alam sebagai sebuah konsekwensi. Tapi kelompok kelas menengah Aceh ini jumlahnya sangat kecil (Siegel, 2002: 201).

BAB VIII

PERJALANAN HISTORIS NASIONALISME INDONESIA

Pada tahun 1945, Indonesia menjadi negara yang baru merdeka setelah dibebaskan dari hampir beberapa abad dijajah oleh penjajahan Belanda, dikarenakan kesadaran akan rasa persatuan dan pandangan yang sangat dalam. Rekonstruksi integrasi nasional dan infrastruktur ekonomi menjadi sasaran utama saat itu (Drake, 1992: 297). Nasionalisme mendalilkan keberadaan orang dan menyatakan bahwa mereka berhak mengambil alih sebuah organisasi negara lama atau membangun yang baru.

Gerakan nasionalis mencoba melakukan ini atas nama orang-orang yang telah berjuang. Biasanya, para pemimpin gerakan semacam itu berasal dari pusat atau lebih tepatnya, wilayah perkotaan yang luas dari negara yang ditetapkan (McIntyre: 75). Tidak kalah pentingnya, Indonesia terutama yang meliputi negara kepulauan, di mana bapak pendiri gerakan nasionalis berasal dari *Center* Jakarta dan juga sekitarnya. Di negara yang berbeda secara geografis dan etnis seperti Indonesia, proses hubungan regional seringkali mengharuskan penahanan sejarah dan tradisi penduduk lokal yang mendukung warisan yang lebih besar (Hoey, 2003: 110).

Berdasarkan keanekaragaman geografis ini, Sukarno menggunakan konsep 'Indonesia Raya' sebagai konsep

nasionalisme Indonesia, yang ditujukan untuk perumusan masyarakat Indonesia (McIntyre, 1973: 75). Sayangnya, setelah kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada gerakan Darul Islam (*House of Islam*), yang mendukung nasionalisme Islam dan bukan nasionalisme sipil. Beberapa asosiasi semacam itu terikat untuk membentuk antara Islam dan nasionalisme Indonesia.

Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada norma etnologi dan adat mereka, dan terlebih lagi Indonesia terbagi oleh sejumlah besar pulau terpencil dan terpisah, maka penyatuan koersif dan integrasi koersif merupakan instrumen penting yang dapat digunakan untuk menghadapi keragaman tersebut oleh pemerintah pusat (Vandenbosch, 1952: 182)

Nasionalisme Indonesia digunakan untuk mendukung dan mempromosikan rasa homogenitas dan identitas pribumi yang dengan kuat menolak dan mengecualikan partisipasi masyarakat imigran non pribumi (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 667). Apalagi nasionalisme Indonesia secara ideologis dimanifestasikan dalam Pancasila, lima prinsip negara: kepercayaan kepada Tuhan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini dipostulasikan sebagai nilai bersama yang mendukung masyarakat toleran sekuler, majemuk, dan religius (Weatherbee, 2002: 23).

Pemerintah menganggap etnis sebagai masalah sensitif, kemungkinan ancaman terhadap persatuan nasional dan bahkan tidak mengumpulkan statistik tentang kelompok etnis dalam sensus (Suryadinata dalam Turnet, 2005: 189). Tidak ada bagian dari orang yang dapat menuntut hak individu untuk dirinya sendiri atau meminta pembagian kekuasaan ke dalam sub masyarakat, tidak ada konflik yang diizinkan untuk terjadi (Kreuzer, 2004: 19).

Setelah Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945, setelah kolonialisme, nasionalisme, dan revolusi, elite di antara berbagai kelompok, agama, dan ras bertekad untuk membentuk identitas nasional yang baru dan, dengan demikian, menundukkan kesadaran kelompok politik mereka yang terpisah (Wanandi, 2002: 136).

Umumnya gerakan separatis regional muncul karena ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan pemerintah regionalisme ketika pemerintah Indonesia diubah dari sistem federal menjadi sistem kesatuan pada bulan Agustus 1950, akibat dari ketidakpuasan provinsi tersebut menyebabkan daerah melakukan pemberontakan terbuka kepada pemerintah pusat. Provinsi-provinsi yang ada di daerah merasa kurang berkuasa di pemerintahan setempat setelah konversi ini (Vandenbosch, 1952: 184).

Sebagian besar analis politik berpendapat bahwa faktor utama perselisihan nasionalisme Indonesia yang didukung oleh nasionalis sekuler Indonesia adalah pemberlakuan identitas nasional yang seragam untuk seluruh warga negara Indonesia. Sementara penganan implementasi sanksi ini, sebenarnya tidak sesuai dengan budaya sub nasional dan juga identitas regional (Arifianto, 2008: 6). Begitu etnis minoritas kehilangan kepercayaan bahwa negara dapat mempromosikan nasionalisme kewarganegaraan, mereka kemudian menganggap negara sebagai badan etnik mayoritas dan karena itu tidak percaya bahwa ini janji multi-budaya tentang status atau otonomi yang akan disampaikan kepada etnis minoritas. Sehingga menyebabkan melemahnya nasionalisme sipil (Brown, 2001: 2).

Hal ini diperburuk oleh keyakinan nasionalis sekuler bahwa penciptaan sebuah bangsa dilakukan oleh orang-orang yang

tinggal di wilayah tertentu dan memiliki pengalaman bersama, terlepas dari budaya, agama, dan latar belakang etnis mereka (Arifianto, 2008: 9) . Sejak kemerdekaan, sebagian besar provinsi telah mendorong niat satu sama lain untuk memberontak terhadap pemerintah pusat, apakah karena gerakan separatis menuntut pembagian kekuasaan yang sama atau menuntut kemerdekaan negara baru (John R. Bowen: 155).

Dengan itu, strategi politik Orde Baru yang ditetapkan adalah model nasional dan selanjutnya ia menghilangkan gerakan etno-nasionalis. Dalam praktik politik sehari-hari, model nasional dipaksakan pada ekonomi, birokrasi melalui eksistensi tentara yang ada di luar provinsi. Sistem pendidikan umum nasional yang dibentuk, membuat bahasa Indonesia diwajibkan di setiap sekolah. Kebijakan ini direncanakan untuk mengubah provinsi-provinsi dan memasukkan mereka ke dalam negara Indonesia modern secara efektif (Bertrand, 2002: 23-4). Menurut rezim otoriter Orde Baru, nasionalisme etno-kultural bergantung pada mitologi sejarah untuk menarik etnis Jawa sebagai inti etnis, sementara perekrutan elit menjadi posisi pada tingkat tertentu, bergantung pada pola Kekuasaan pusat.

Banyak daerah di Indonesia menentang penggunaan simbol ini (Majapahit dan Sriwijaya), terutama mereka yang berasal dari kedua kerajaan Jawa kuno ini, dengan alasan bahwa memuliakan simbol ini dapat menyatukan integritas nasional dan menolak adanya kolonisasi non Sriwijaya dan Majapahit lainnya. (Kroef dalam Drake, 1992: 298). Warga asli Indonesia dihadapkan oleh masalah persatuan nasional dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sejak kekalahan kolonial Belanda terjadinya ketidakseimbangan representasi kelompok etnis dalam aspek politik maupun distribusi ekonomi (Siddique & Suryadinata,

1981-1982: 663).

Tapi sebenarnya, bisa jadi ada banyak bentuk persatuan, semacam konfederasi, federasi dan bahkan aliansi antara negara merdeka. Pada saat yang sama bentuk semacam ini harus diikuti dengan penghentian dari semua jenis paksaan (Lane, 2002). Karena warga Aceh diobati dengan menggunakan senjata oleh pemerintah pusat, maka mereka memperlakukan Indonesia tidak hanya dengan keadaan intim, khususnya mengenai integrasi nasional Indonesia dan juga nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, Indonesia kemudian menganggap gerakan separatis Aceh sebagai ancaman pahit dan paling berbahaya daripada Belanda sebelumnya (Mabry, 2005: 14).

BAB IX

PENUTUP

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, naluri etno nasionalisme kembali muncul di setiap wilayah di Indonesia, khususnya Aceh. Kaum etno-nasionalis muncul dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM), walaupun pemberontakan ini lebih dahulu ditindas oleh pemerintah Orde Baru, namun keberadaannya selama transisi demokrasi di Indonesia mendapatkan dukungan rakyat yang sangat besar dari warga lokal (Bertrand, 2002: 21).

Untuk pejuang Aceh Merdeka (GAM), perang dengan Indonesia membunuh orang para imigran, apakah itu imigran sipil biasa atau militer Indonesia, karena motivasi perang GAM didasarkan pada kebencian etnis paroki (Schulze, 2003). Warga Aceh sama sekali menolak gagasan tentang dugaan keberadaan ‘bangsa Indonesia’ pada basis sejarah, budaya, sosiologis, antropologi, ekonomi dan politik (Thaib, 2000: 3). Selain itu, Aceh sebagai wilayah perifer di dieksploitasi sebagai koloni internal di negara ini daripada meredakannya (Brown, 2001: 13).

Model nasionalisme nasional telah gagal, karena keterasingan inklusi kelompok dalam model itu sendiri dan menolak identitas mereka serta mengikuti dengan membatasi juga budaya mereka. Multi etnik menuntut pengakuan dari negara pusat, dan dengan demikian tidak adanya pengakuan etnik dan budaya ini, mereka bermaksud untuk menekankan identitas etnik mereka dari

mobilisasi dan pemisahan etno-nasionalis dari negara utama (Bertrand, 2002: 25).

Kemudian konflik etnis mulai dapat dilihat dan berpotensi tidak sesuaisebagai manifestasi dari ketegangan yang timbul dari artikulasi visi masyarakat nasional yang berlainan (Brown, 2001: 6). Mobilisasi dan kekerasan etno-nasionalis sering terjadi di negara transisi demokratis dimana model nasional belum disepakati mengenai kesepakatan sebelumnya. Definisi wilayah dan agenda politik bangsa tetap tidak terdefinisi untuk menciptakan ketidakpastian tentang masuknya kelompok atau istilah inklusi mereka (Bertrand, 2002: 2).

Setelah tahun 1999 Indonesia masih dihadapkan oleh gerakan etno-nasionalis di Aceh dan provinsi lainnya. Para aktivis kemerdekaan di wilayah ini menekankan kembali gagasan bahwa mereka secara kuat telah diintegrasikan ke Indonesia menyusul eksploitasi ekonomi lokal Jakarta yang telah memperburuk situasi (Klinken, 2003: 126).

Implikasinya adalah bahwa nasionalisme Aceh, mengklaim bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat dengan satu kesamaan, seperti nasionalisme lainnya (Brown, 2004: 16), yang pantas membentuknya adalah negara merdeka sendiri. Namun, negara yang ada selalu akan berusaha mencegah pemisahan diri, meski hal ini dengan sendirinya tidak menyebabkan menurunnya rasa kedaerahan atau subnasionalisme etnis.

Sebaliknya, mungkin penyangkalan tersebut mendorong munculnya gerakan separatis, karena kelompok meningkatkan permintaan mereka untuk memiliki identitas teritorial kelompok mereka yang dijaga oleh pemerintah mereka sendiri di dalam negara mereka sendiri (Knight, 1982: 526). Melihat pengalaman bekas Negara Uni Soviet yang hancur terpisah-pisah sehingga

menjadi Negara-negara kecil dan Negara Balkan dapat dijadikan ajuan *senagailearned experience* bagi Indonesia.

Upaya yang hendak dilakukan dengan mengkaji kembali kesalahan implemementasi nasionalisme itu sendiri pada Negara-negara tersebut sehingga membawa negaranya kepada kehancuran total. Tentunya Indonesia merupakan negara geografinya sangat luas dan rentan bisa saja mengalami hal yang serupa seperti Negara tersebut.

Perjalanan historis nasionalisme Indonesia mengalami pasang surut dalam sejarahnya. Terlepas dari mis-implementasi nasionalisme pada masa orde lama dan orde baru, namun jika dilihat dari perkembangannya dewasa ini, sejak dari masa transisi demokrasi presiden Habibie, Abdurrahman Wahid (Gusdur), Megawati Sukarno Putri hingga masa reformasi Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi, telah banyak upaya yang dilakukan.

Kecerdasan para pemimpin bangsa pada masa reformasi dalam memahami pentingnya pembangunan nasionalisme yang lama telah dibungkam telah menemui kepuasan rakyat. Masyarakat secara umum sudah merasakan keberadaan mereka yang sesungguhnya dalam NKRI, imbas dari kesejahteraan dan keadilan yang mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam ranah otonomi daerah dan otonomi khusus.

Seperti dipahami bahwa pembangunan merupakan proses perubahan dari keadaan yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik, tidak hanya dimaknai pembangunan itu semata-mata dari perspektif fisik, namun pembangunan juga dimaksud dari perspektif non fisik. Oleh karena itu, disamping sudah mulai menyentuhnya pembangunan di nusantara secara fisik, nasionalisme yang merupakan rasa, kepemilikan

individu terhadap bangsanya, lebih dapat dikatakan bahwa nasionalisme itu juga harus dibangun dari rasa tersebut yang tentu berhubungan sebagai pembangunan non fisik. Namun pembangunan nasionalisme saja tidak cukup tanpa diikuti pembangunan ekonomi, penulis mengistilahkan disini sebagai nasionalisme ekonomi.

Bila diamati masih sangat rendah posisi dan peran warga Negara pribumi yang mendapatkan kesempatan ekonomi, dimana masih dominannya etnis Tionghowa di dalam aktivitas ekonomi bangsa merupakan neo-embrio yang akan lahir kembali dalam bentuk perlawanan masyarakat kepada Negara dalam bentuk ancaman nasionalisme ekonomi. Artinya kesenjangan ekonomi tersebut tanpa disadari lambat laun terus terakumulasi yang pada akhirnya pemerintah tidak dapat mengatasi kisruh ancaman nasionalisme ekonomi ini.

Demonstrasi rakyat yang terbentuk dalam kekuatan rakyat (people power) pada tahun 1998, merupakan akumulasi bukan saja dari ketidakpuasan rakyat kepada bentuk politik Negara namun keputusan ekonomi juga sebagai kekecewaan warga. Sehingga warga etnis berbondong-bondong eksodus ke Negara lain untuk menyelamatkan jiwa mereka dari amukan masa. Tentu selaku warga Negara yang peduli terhadap bangsa tidak ada keinginan kejadian ini kembali terulang, sebab *cost* politik yang sangat mahal yang harus dikeluarkan Negara untuk menstabilkan kembali kondisi yang tidak stabil ke arah yang lebih baik.

Dependensi Indonesia kepada pemerintah Cina dalam usaha meningkatkan ekonomi nasional telah menghadapkan Indonesia kepada dilema dan tantangan baru. Cina bukan rekan Negara yang baru bagi Indonesia, namun ketergantungan yang sangat besar terhadapnya dapat membawa Indonesia kepada nasib yang

pernah dialami Negara Latin America, dimana bertahun-tahun Negara tersebut tidak berhasil membangun bangsa disebabkan ketergantungannya dengan Eropa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguswandi. Civil society: the missing peace of peace building. Retrieved from: <http://bib.cfc.dnd.ca/ipac20/ipac.jsp?session=1H39313W041G4.29427&profile=cfc&uri=link=3100016~!151629~!3100001~!3100002&aspect=subtab46&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=Peace-building+--+Japan.&index=SUBJECT>.
- Arifianto, Alexander R. (2008). "Contesting the Nation: Competing Nationalisms in Indonesia" Paper presented at the annual meeting of the MPSA Annual National Conference, Palmer House Hotel, Hilton, Chicago, IL Online <PDF>. 2009-05-23 from http://www.allacademic.com/meta/p268416_index.html.
- Ballard, John B. (2008). *Triumph of Self-determination: operation stabilize and United Nations peace making in East Timor*. USA: Praeger Security International.
- Barbanti, Jr., Olympio. (2004). *Development and Conflict Theory. Beyond Intractability*. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Research Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: August 2004 <http://www.beyondintractability.org/essay/development_conflict_theory/>
- Bartos, Otomar J & Paul Wehr. (2002). *Using conflict theory*. New York: Cambridge University Press.
- Bertrand, Jacques. (2002). *National Models?, Ethno nationalist Violence and Democratic Consolidation: an analysis of*

three ethno nationalist movements in Indonesia” Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Boston Marriott Copley Place, Sheraton Boston & Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts Online <.PDF>. 2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p66407_index.html.

Blaskett, Bev. (2006). Insurgency movements: Indonesia and Aceh. University of Ballarat. Retrieved from: <http://uob-community.ballarat.edu.au/~bblaskett/index.html/SOCOG%202103%20Insurgency/Old%20notes%20Aceh.pdf>.

Bowen, John R. (2005). Normative pluralism in Indonesia: regions, religions, and ethnicity. Retrieved from: <http://artsci.wustl.edu/~anthro/research/bowen/Normative%20Pluralism%20in%20Indonesia.pdf>.

Bowen, John. (2007). The new anthropology of ethnicity and identity and why it matters for Aceh and Indonesia. First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies. By ARI, BRR. Singapore-Indonesia.

Bowen, John R. (2005). Normative pluralism in Indonesia: regions, religious, and ethnicities. Retrieved from: <http://artsci.wustl.edu/~anthro/research/bowen/Normative%20Pluralism%20in%20Indonesia.pdf>.

Braisted, William R. (1954). Nationalism in Eastern Asia. Source: The Journal of Modern History, Vol. 26, No. 4 (Dec., 1954), pp. 356-363. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1876112>.

Brown, David (2004). Why independence? The instrumental and ideological dimensions of Acehese nationalism. Working

Paper No. 105. Asia Research Center. Australia.

- Brown, David. (2001). Why might constructed nationalist and ethnic ideologies come into confrontation with each other? Working paper series No. 17 (Nov., 2001). Southeast Asia Research Centre (SEARC). City University of Hongkong.
- Brubaker, Rogers and David, D. Laitin. (1998). Ethnic and nationalist violence. Source: Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998), pp. 423-452. Published by Annual Reviews. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/223488>.
- Calhoun, Craig. (1993). Nationalism and ethnicity. Source: Annual Review of Sociology, Vol. 19 (1993), pp. 211-239. Published by: Annual Reviews. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2083387>.
- Chandra, Siddharth. (1999). Colonial policy, wage inequality, and the birth of nationalism: the case of the Dutch East Indies. Retrieved from: http://eh.net/Clio/Conferences/ASSA/Jan_00/chandra.pdf.
- Drake, Christine. (1992). National integration in China and Indonesia. Geographical Review, Vol. 82, No. 3 (Jul., 1992), pp. 295-312. Published by American Geographical Society. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/215353>.
- Egyankosh. Some concepts: Imperialism, nationalism, fascism, Revolution. Retrieved from: <http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/26167/1/Unit2.pdf>.
- Guan, Kwa Chong. (2006). Rewriting Indonesian history: The future in Indonesia's past. Working paper series. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS).
- Hah, Chong-Do and Jeffrey Martin. (1975). Toward a Synthesis

of conflict and integration theories of nationalism. Source: World Politics, Vol. 27, No. 3 (Apr., 1975), pp. 361-386. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2010125>.

- He, Baogang and Anthony Reid. (2004). Special issue editor's introduction: four approaches to the Aceh question. Asian Ethnicity, Volume 15, Number 3, October 2004. Taylor & Francis Ltd. DOI: 10.1080/1463136042000259752. Retrieved from: <http://www.chinesedemocratization.com/English%20Website/frame/materials/journal/english/HeReid.pdf>.
- Hefner. Robert W. (2002). Globalization, governance, and the crisis of Indonesian Islam. Center for Global, International, and Regional Studies. University of California-Santa Cruz. March, 7-9, 2002. Retrieved from: <http://www2.ucsc.edu/cgirs/conferences/carnegie/papers/hefner.pdf>.
- Heywood, Andrew. (2000). Key concepts in politics. New York: Palgrave Macmillan.
- Heywood, Andrew. (2007). Politics. New York: Palgrave Macmillan.
- Hjerm. Mobilizing nationalist sentiments- Which factors affect nationalist sentiments in Europe? Retrieved from: http://www.uaces.org/pdf/papers/0801/2008_Hjerm.pdf.
- Hoey, Brian A. (2003). Nationalism in Indonesia: building imagined and intentional communities through transmigration. Ethnology Vol. 42, No. 2. Spring 2003, pp. 109-26, c/o Department of Anthropology, The University of Pittsburg, Pittsburg PA 15260 USA. The University of Pittsburg. Retrieved from: http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/39189/2/hoey_ethnology_2003.pdf.

- Jacoby, Tim. (2008). *Understanding conflict and violence*. Abington, Oxon: Routledge.
- Sociology Organization. (1994). Marxism: Structural Conflict Theory: <http://www.sociology.org.uk/pctmmarx.doc>. Diakses tanggal 20 April 2017
- King, James C. (1934). Nationalism. Source: The American Journal of Sociology, Vol. 39, No. 6 (May, 1934), pp. 818-826. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/27674>.
- Kingsbury, Damien. (2002). Interest, nations, and the state development: inability in archipelagic Southeast Asia. Retrieved from: <http://devnet.anu.edu.au/online%20versions%20pdfs/59/2059Kingsbury.pdf>.
- Kingsbury, Damien. Islam and political secularism: their convergence in an independence struggle. www.caei.ar. Retrieved from: <http://www.caei.com.ar/es/programas/asia/06.pdf>.
- Klinken, Geery Van. Ethnicity in Indonesia. Retrieved from: <http://ssrn.com/abstract=1127126>.
- Klinken, Gerry Van. New actors, new identities: post-Suahrto ethnic violence in Indonesia. Retrieved from: <http://ssrn.com/abstract=1134267>.
- Knight, David B. (1982). Identity and territory: Geographical perspectives on nationalism and regionalism. Source: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 72, No. 4 (Dec., 1982), pp. 514-531. Published by: Taylor & Francis, Ltd on behalf of the Association of American Geographers. Stable URL: <http://www.jstor.org/>

stable/2563201.

Kreuzer, P. (2004). Framing Violence. The Role of Culture and State Institutions. Asian Perspectives” Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada Online <.PDF>. 2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p73554_index.html.

Kreuzer, Peter. (2004) “Framing Violence. The Role of Culture and State Institutions. Asian Perspectives” Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada Online <.PDF>. 2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p73554_index.html.

Lane, Max. (2002). Indonesia: when ‘national unity’ is no longer voluntary. Green left weekly. Retrieved from: <http://www.greenleft.org.au/2002/497/28018>.

Lanti, Irman G. (2002). How to secure Indonesia’s cooperation in fight against militants. Retrieved from: <http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/IDSS012002.pdf>.

Lawfield, Thomas. (2009). Nationalism in question. Retrieved from: http://www.monitor.upeace.org/innerpg.cfm?id_article=654#_ftn22.

Lintner, Bertil. (1999). Giving no quarter. Far Eastern Economic Review (FEER); Jul 29, 1999; 162, 30; ABI/INFORM Global.

Mabry, T. J. (2005). Nationalism and Language in Muslim Minority conflict: A Comparative Study of Language Policy in the Secessionist Politics of Mindanao and Aceh” Paper

presented at the annual meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii Online <.PDF>. 2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p69478_index.html.

McClelland, Kent. (2000). Conflict theory. Retrieved from: <http://web.grinnell.edu/courses/soc/s00/soc111-01/IntroTheories/Conflict.html>

McIntyre, Angus. (1973). The greater Indonesia' idea of Nationalism in Malaya and Indonesia. *Modern Asian Studies*, Vol. 7, No. 1 (1973), pp. 75-83. Published by Cambridge University Press. Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/312037>.

Nicholson, M. (1992). Rationality and the Analysis of International Conflict. Retrieved from: [http://www.unimuenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/1\)%20Conflict%20definition.doc](http://www.unimuenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/1)%20Conflict%20definition.doc).

Nishihara, Masashi, Continuity in Indonesian styles of political rule. Retrieved from: http://www.ide.go.jp/English/Publish/Periodicals/De/pdf/74_04_05.pdf.

Orcutt, James D. (1983). The Conflict Tradition: Neo-Marxist and Interest Group Theory: analyzing deviance. Retrieved from: http://deviance.socprobs.net/Unit_3/Theory/Conflict.htm.

Plato.(2001).Nationalism.Retrievedfrom: <http://plato.Stanford.edu/entries/nationalism>.

Puhovski, Zarko. (2004). The moral basis of political restructuring in Chris Brown (Ed.), political reconstructuring in Europe ethical perspective. London: Routledge.

- Ramage, Douglas E. (2005). *Politics in Indonesia: democracy, Islam and the ideology of tolerance*. USA and Canada: Roulledge.
- Reimann, Cordula. *Assessing the state-of-the-art in conflict transformation*. Berghof Research Center for constructive conflict management. Retrieved from: <http://www.berghof-handbook.net>.
- Sachs, N. (2009). *Experimenting with Identity: Islam, Nationalism & Ethnicity*” Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association 67th Annual National Conference, The Palmer House Hilton, Chicago, IL Online <APPLICATION/X-PDF>.2010-01-22from: http://www.allacademic.com/meta/p362494_index.html.
- Savich, Carl K. *Nationalism and War- Nationalism: origins and historical evolution*. Source:www.MakNews.com. <http://www.maknews.com/html/articles/savich/nationalism.pdf>.
- Siegel, James (2002). *The Idea of Indonesia Continues. The middle class ignores Acehnese*. Roudladge.
- Schulze, Kirsten E (2004). *The free Aceh movement (GAM): anatomy of a separatist organization*. Policy Studies 2. Washington: East West Center.
- Schulze, Kirsten E. (2003). *The other side to Aceh’s rebel*. Retrieved from: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/EG22Ae05.html.
- Siddique, Sharon and Leo Suryadinata. (1981-1982). *Bumiputra and pribumi: economic nationalism (indiginism) in Malaysia and Indonesia*. Published by Pacific affairs, University of British Columbia. Vol. 54, No. 4 (1981-

1982), pp. 662-687. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2757890>.

Smith, Anthony D. (1996). Culture, community and territory: the politics of ethnicity and nationalism. Source: *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 72, No. 3. *Ethnicity and International Relations* (Jul., 1996), pp. 445-458. Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2625550>.

Smith, Dan. (2000). Ethical uncertainties of nationalism. Source: *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No. 4, Special Issue on Ethnicity of War and Peace (Jul., 2000), pp. 489-502. Published by: Sage Publication, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/424643>.

Smith, Mike. (2009). Understanding nationalism. www.globalpolitician.com.

Spykman, Nicholas J. (1926). The social background of Asiatic nationalism. Source: *The American Journal of Sociology*, Vol. 32, No. 3 (Nov., 1926), pp. 396-411. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2765541>.

Sundararaman, Shankari. Effects of globalization in plural societies: A case study of Indonesia. Retrieved from: <http://www.asianscholarship.org/asf/ejournal/articles/Shankari%20Sundararaman2.pdf>.

Tamir, Yael. (1995). Review work(s): Imagined communities by Benedict Anderson. *Nationalism: Five roads to modernity* by Liah Greenfeld. *National identity* by Anthony D. Smith. Source : *World Politics*, Vol. 47, No. 3 (Apr., 1995), pp. 418-

440. Published by: The Johns Hopkins University Press.
Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2950694>.

Thaib, Lukman (2000). Aceh's case: Possible solution to a festering conflict. *Journal of Muslim minority affairs*. Vol. 20, No. I, 2000. University Kebangsaan Malaysia. Pp. 105-110. Retrieved from: <http://acehnet.tripod.com/thaib.htm>

Turner, Mark. (2005). From centralized authoritarianism to decentralized democracy: regional autonomy and the state in Indonesia in Marc Weller and Stefan Wolff (Eds.), *autonomy, self-government and conflict resolution: innovative approaches to institutional design in divided societies*. New York: Routledge.

Ufen, Andreas. (2006). Political parties in post-Suharto Indonesia: between politik aliran and Philippinization. Working papers. German Institute of Global and Areas Studies (GIGA). No. 37. Germany.

Vandenbosch, Amry. (1952). Nationalisma and religion in Indonesia. Source: *Far Eastern Survey*, Vol. 21, No. 18 (Dec. 17, 1952), pp. 181-185. Published by: Institute of Pacific Relations. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3023866>.

Walker, Michel R. (2003). Nations and nationalism since 1780 by Hobbsbawn: Summary for study. Retrieved from: <http://www.regulafidei.com/book-reviews/131-nations-and-nationalism-since-1780-by-hobbsbawn-summary-for-study>.

Wallenstein, Peter. (2002). *Understanding conflict resolution: war, peace and the global system*. London: Routledge

- Wanandi, Jusuf. (2002). Indonesia: a failed state? *The Washington Quarterly*, summer 2002, pp. 135-146. By The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from: <http://www.twq.com/02summer/wanandi.pdf>.
- Weatherbee, Donald A. (2002). Indonesia: political drift and state decay. Retrieved from: <http://www.watsoninstitute.org/bjwa/archive/9.1/Indonesia/Weatherbee.pdf>.
- Wirth, Louis. (1936). Types of nationalism. Source: *The American Journal of Sociology*, Vol. 41, No. 6 (May, 1936), pp. 723-737. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2768827>.

BIODATA PENULIS



Zulham lahir di kota Langsa, 1978. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe-Aceh. Saat ini sebagai wakil Dekan III. Ia menyelesaikan pendidikan formal pertamanya dalam ilmu politik dari Aligarh Muslim University (AMU-India) tahun 1998, dan melanjutkan Master dalam Hubungan Internasional di Bangalore University-India tahun 2002. Pada tahun 2007, penulis mendapat kesempatan untuk studi program singkat resolusi konflik dan *forced migration* di Universitas Oxford (Inggris). Sekarang kandidat Doktor Komunikasi Politik Islam di UIN Sumut. Penulis sangat tertarik dalam riset bidang politik, pemerintahan, perubahan sosial, Gender, Hak Asasi Manusia, LSM, Hubungan Internasional, Diplomasi dan Perdamaian. Penulis dapat dihubungi melalui zulhambere@gmail.com



Risna Dewi lahir di Loskala pada tahun 1982. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe-Aceh. Menyelesaikan strata satunya pada prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Malikussaleh tahun 2006 dan Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011. Penulis tertarik pada kajian manajemen pelayanan publik, pembangunan regional dan pemberdayaan masyarakat. Beliau dapat dikontek lewat risna_dewi82@yahoo.com



Ristati lahir di Sigli-Aceh tahun 1982, Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe-Aceh. Saat ini ia adalah Sekretaris Prodi D-III Kesekretariatan Unimal. Me enyelesaikan Pendidikan pertamanya pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh tahun 2004, dan Pascasarjana Program Studi Ilmu Manajemen di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan tahun 2012. Bidang kajian tertarik pada keuangan dan ekonomi politik. Penulis dapat dihubungi lewat ristati.tati82@gmail.com

Nazaruddin lahir di Aceh Utara tahun 1978. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Ilmu Administrasi



Negara, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe-Aceh. Menyelesaikan strata satunya pada prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Malikussaleh tahun 2006 dan Megister Administrasi Publik (M.AP) diselesaikan di FISIP UNPAD tahun 2014. Penulis dapat di-email ke nazarunimal@gmail.com

